

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

##### **4.1.1. Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat**

Hubungan Republik Indonesia (RI)-Amerika Serikat (AS) telah terbina sebelum terjadinya Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Hubungan diplomatik kedua negara secara resmi ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta Tanggal 28 Desember 1949, dan menunjuk Horace Merle Cochran sebagai Duta Besar AS pertama untuk Indonesia. Sedangkan pada tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk AS (Kementerian Luar Negeri RI).

Amerika Serikat (AS) adalah mitra tradisional Indonesia dalam bidang perdagangan atau ekonomi sejak beberapa tahun lalu. AS merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah China, Jepang, dan Singapura. Dan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-28 bagi AS. Kanada, China, Meksiko, Jepang, dan Jerman merupakan lima negara yang merupakan mitra dagang terbesar bagi AS. Ekspor Indonesia ke AS mengalami peningkatan sebesar 2,6% dari tahun 2013 ke tahun 2015.

Kerjasama dalam bidang ekonomi ini dapat dilihat pula pada PT. Freeport di Papua Barat. PTFI adalah perusahaan pertambangan skala multinasional yang berfokus kepada eksplorasi pada bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak serta pendistribusian hasil eksplorasi tersebut ke negara-negara di dunia. Harapan pemerintah pada perusahaan asal AS yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua ini agar adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. PTFI ini merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Amerika Serikat sejak lama, dan juga menjadi salah satu kepentingannya (Yustiantoro, 2012, hal.8). Jika membicarakan wilayah Papua, Amerika

Serikat merupakan salah satu negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kemerdekaan Papua. OPM merupakan suatu gerakan masyarakat Papua yang mulai berdiri pada tahun 1965 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Hubungan baik pemimpin kedua negara ini juga memiliki dampak baik bagi kedua negara bagi kerjasama kedua negara. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, kedekatannya dengan Presiden AS saat itu, John F. Kennedy memiliki dampak baik bagi hubungan kedua negara, termasuk pada pertahanan. Pada Kunjungan Presiden Soekarno kepada koleganya tersebut akhir 1959, Kennedy berterima kasih atas keputusan Pemerintah Indonesia untuk melepas Allan Pope, pilot CIA, yang ditembak jatuh Kapten Udara Penerbang Dewanto dalam pertempuran udara pada 1958. Pada kesempatan itu juga, Presiden Kennedy menawarkan bantuan kepada Presiden Soekarno sebagai “pengganti” Pope. Dan pesawat Hercules merupakan pilihan yang berdasarkan pada “keperluan” dari Panglima AU saat itu, Laksamana Madya Udara Suryadarma, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) membutuhkan pengganti pesawat transportasi de Havilland Canada DHC-4 Caribou. Indonesia merupakan negara pertama yang mengoperasikan pesawat Hercules C-130 buatan AS (Hilal, 2015).

Kemudian, hubungan Indonesia dengan negara adidaya ini terus menunjukkan kemajuan, Hubungan Indonesia dan AS mulai terjalin cukup kuat pada saat pemerintahan Soeharto. Hal itu ditunjukkan dengan sikap kepemimpinan Soeharto yang merupakan pemimpin anti komunis yang juga merupakan prinsip AS. Soeharto yang pemerintahannya cenderung ke AS mengadakan kerjasama bilateral, khususnya di bidang ekonomi. Kemudian, kerjasama tersebut berjalan dengan baik (Yuliantoro, 2012).

Hubungan baik Indonesia dan AS juga dapat dilihat dari kerangka ASEAN. AS sering terlibat dengan Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya dalam pembahasan mengenai isu-isu global dan kawasan yang menjadi perhatian bersama, seperti isu Laut China Selatan dan keamanan maritim di kawasan Asia Timur. Selain membahas isu keamanan, AS juga

terlibat dalam upaya peningkatan kerjasama di kawasan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemerintahan Obama mengedepankan pendekatan multilateralisme dalam merespon permasalahan global dan kawasan. Lebih jauh lagi, keterlibatan AS di ASEAN ini memperlihatkan upaya AS dalam meletakkan pengaruhnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Ini juga merupakan langkah fundamental dan strategis dalam menjawab tren global yang sedang bertransformasi dari kekuatan negara-negara barat ke kawasan Asia, dan dalam upaya menyeimbangkan kekuatan (*balance of power*) terhadap kekuatan China yang sedang bangkit (Muhamad, 2016).

Hubungan Indonesia dan AS sempat dingin pada masa Pemerintahan Soeharto karena kasus berdarah yang terjadi di Santa Cruz, Dili, Timor Timur. Permasalahan ini akan dibahas lebih rinci di sub bab berikutnya. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa saat ini Indonesia dan AS memiliki hubungan terbaik selama ini. Hal itu juga didukung dengan diadakannya pertemuan pertama dengan Menteri Luar Negeri Clinton, the first Ministerial Commission (Mazrieva, 2012).

#### **4.1.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat**

Dasar utama dari terbentuknya kerjasama adalah kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat, disamping itu, kerjasama itu harus menjunjung tinggi azas kesetaraan dan juga independensi, dan hal ini juga yang ditunjukkan oleh Indonesia kepada semua negara dalam semua *agreement*. Dinamika hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat telah ditunjukkan sejak hubungan diplomatik secara resmi terjalin pada tahun 1949. Akan tetapi, kerjasama Pertahanan Indonesia dan AS sempat terhenti karena AS memberlakukan embargo persenjataan terhadap Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan AS mulai dibatasi setelah terjadi pembunuhan masal di Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada tahun 1991. Delapan tahun kemudian, AS menjatuhkan embargo terhadap Indonesia atas respon dari intervensi militer yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999 untuk mencegah

pemisahan diri Timor Timur yang menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil dan merusak 70 persen infrastrukturnya (Morrissey, 2006). Dampak dari embargo ini adalah selain F-16 yang mati total, pesawat Hercules C-130 yang juga buatan AS tidak layak terbang karena tidak ada suku cadang (Hilal, 2015).

Embargo ini kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti China, Rusia, Korea Selatan, Belanda, dan Turki agar Indonesia tetap memiliki kekuatan pertahanan yang stabil. Namun, di sisi lain, Indonesia tetap melakukan dialog dengan AS untuk membicarakan permasalahan ini. Dialog ini telah dilakukan beberapa tahun, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Yusliantoro, hal. 7).

Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Ia dan menteri Pertahanan Mahfud MD melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri pertahanan AS, William Cohen pada 20 September 2000. Pada saat itu pihak AS menyepakati untuk perizinan kembali atas ekspor suku cadang ke Indonesia. Namun, hal tersebut tidak pernah terealisasi dan TNI memutuskan untuk impor suku cadang dari negara lain. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendesak AS agar mencabut embargo tersebut. Ketika Menlu AS, Colin Powell, bertemu dengan Menlu Indonesia, Hassan Wirajuda, Ia sempat menanyakan bantuan apa yang dapat dilakukan AS untuk mengurangi beban Indonesia akibat gempa di Nias dan Tsunami di Aceh. Indonesia saat itu menjawab bahwa Indonesia menghadapi kendala dalam transportasi udara akibat embargo yang diberlakukan AS terhadap alutsista Indonesia (Shoelhi, 2009, hal. 237).

Kemudian, Pada 18 November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas masalah embargo dengan Presiden AS, George Walker Bush, di saat pertemuan kerjasama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Busan. Berbagai upaya diplomasi dilakukan SBY, seperti dengan tegasnya SBY mempertanyakan kepada Bush bahwa apabila AS benar-benar memandang Indonesia sebagai sahabat, mengapa AS masih mengembargo Indonesia? Pada akhirnya embargo

senjata Amerika yang diterapkan kepada Indonesia selama era pemerintahan presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan megawati dicabut secara resmi pada 22 November 2005 dengan pernyataan resmi juru bicara Departemen Luar Negeri, Sean McCormack (Shoelhi, 2009, hal. 239-241). Hal ini berarti sangat banyak bagi Indonesia karena pada saat itu Indonesia membutuhkan peralatan militer untuk menanggulangi bencana yang terjadi di dalam negeri. Selanjutnya, pada tahun 2009, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono mengatakan bahwa 70% budget militer Indonesia akan digunakan untuk membeli pesawat Hercules C-130 karena dari 24 pesawat tersebut, hanya 6 yang masih layak terbang (Hilal, 2015)

Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, Clinton pernah mengatakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat terjadi secara alami. AS memandang Indonesia sebagai tonggak stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dan sebagian besar fokus kedua negara ini adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui perdagangan dan pembangunan yang sangat penting tidak hanya bagi bangsa dan rakyat kedua negara, tapi juga kawasan ini (state.gov, 2009-2017)

Perkembangan kerjasama pertahanan kedua negara terus mengalami peningkatan, salah satunya ditunjukkan pada tanggal 10 Juni 2010, Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.IP, M.SI yang mewakili pihak RI dan Deputy Assistance Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Mr. Robert M. Scher yang mewakili pihak AS menandatangani *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense* (Kemhan, 2017). Pada tahun berikutnya, dalam kunjungannya ke Indonesia, Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro. Pembicaraan Menteri Pertahanan kedua negara demokrasi ini menitikberatkan pada peningkatan kerjasama militer setelah lebih dari satu dekade AS memberlakukan embargo terhadap Indonesia. Hubungan atau kerjasama militer kedua negara tersendat selama 12 tahun

dikarenakan pemberlakuan sanksi AS atas isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia selama pemerintahan Soeharto. Seorang pejabat Kemhan AS mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan komitmen luar biasa dari TNI dan Kementerian Pertahanan dalam mereformasi militer. Ia juga menegaskan bahwa hasil dari komitmen Indonesia tersebut adalah AS akan mempererat kerjasama militer dengan Indonesia dalam lingkup pertukaran personil, pertukaran tenaga ahli, pelatihan, dan juga perdagangan bidang pertahanan (BBC, 2011).

Kerjasama antara Indonesia dan AS mengalami banyak peningkatan di bawah pemerintahan Obama, Salah satu pencapaiannya adalah pada kunjungan kenegaraan Presiden Obama ke Jakarta pada November 2010 lalu, ditandatanganinya *comprehensive partnership* oleh Menteri Luar Negeri kedua negara yaitu Hillary Clinton, dan Marty Natalegawa. Kesepakatan yang dijalin kedua negara ini meliputi kerja sama politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pada 26 Oktober 2015, pada kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ke AS, kesepakatan bilateral ini diperkuat dengan ditandatanganinya Pernyataan Bersama Mengenai Kerjasama Komprehensif Bidang Pertahanan (*Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation*). Pernyataan ini menambahkan aspek kerjasama maritim, penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana, modernisasi pertahanan serta melawan ancaman transnasional (US Embassy).

Selain itu, peningkatan juga ditunjukkan dengan dijalankannya forum dialog bilateral Indonesia-AS secara terstruktur. Salah satu forum dialog yang dijalankan kedua negara adalah IUSSD (*Indonesia-United States Security Dialogue*) yang dilaksanakan tiap tahunnya dan diadakan di Indonesia atau AS secara bergantian. Kegiatan bilateral ini dikoordinasikan oleh Kemhan dan dipimpin oleh pejabat setingkat Dirjen. Forum ini merupakan forum andalan kedua negara karena dapat

mempererat kerjasama kedua negara dan juga menjadi wadah komunikasi keduanya.

Pada tahun 2012, Indonesia dan AS melaksanakan IUSSD ke-10 di Washington DC. Dalam pertemuan kali ini kedua negara berhasil membahas berbagai kerjasama pertahanan seperti pembahasan mengenai penyerahan pesawat F-16, dimana Indonesia mendesak AS agar dapat mempercepat *upgrade* F-16 dan diharapkan 16 unit pesawat tersebut dapat tiba di Indonesia sebelum Oktober 2014. Kemudian, AS akan mengalokasikan bantuan *language centre heavy construction vehicles* dalam kerjasama PKO, dan mendorong peningkatan operasional IMMS (*Integrated Maritime Surveillance System*) dalam kerjasama keamanan maritim (Kemhan, 2017).

Kemudian, pada pertemuan IUSSD ke-11, pada tahun 2013, AS menawarkan Pengembangan Bahasa Inggris untuk TNI. Tawaran ini datang setelah *Defense Language Institute* (DLI) mengadakan survey pada Pusat Bahasa TNI, tahun 2010. Pada pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan IPSC yang menjelaskan banyak hal terkait IPSC termasuk perkembangan terkini. Dalam kesempatan kali itu, diungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan bantuan AS dalam rangka pengakuan PKO Indonesia oleh PBB. Kemudian, direktur Teknologi dan Industri Indonesia, menjelaskan lisensi ekspor Indonesia untuk pertahanan dan perlengkapan keamanan sebagai regulasi dari Hukum Nomor 16 Tahun 2012 dalam industri pertahanan. Dalam hal ini, pihak AS mengomentari bahwa meskipun terdapat regulasi dari Hukum Indonesia Nomor 16/2012 yang mana mengatakan bahwa industri pertahanan luar negeri harus menyediakan transfer teknologi untuk pembelian barang militer, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi tanggungjawab atas segala jenis transfer teknologi.

Pada pertemuan IUSSD ke-13 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2014 di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa pokok bahasan disampaikan kedua negara sebagaimana berikut: (Kemhan, 2017)

- a. AS menekankan pentingnya IUSSD sebagai salah satu bentuk momentum kerja sama pertahanan yang harus dipertahankan. AS juga menyampaikan komitmen pemerintahnya untuk mendukung kebijakan Pemerintahan baru Indonesia khususnya visi Jokowi dibidang Maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
- b. Tujuan Kemhan RI pada pemerintahan baru secara umum tetap sama dengan berfokus pada pengembangan personel, modernisasi alutsista, pengembangan infrastruktur dan pengembangan organisasi dan manajemen. Hanya saja sekarang lebih menekankan dengan visi pemerintahan Jokowi di bidang maritim.
- c. Indonesia membahas isu keamanan maritim, dengan mengangkat isu pembentukan Bakamla sebagai badan yang dapat melakukan penindakan di laut yang juga merupakan implementasi Indonesia dalam mendukung visi pemerintahan Jokowi. Bakamla berencana menambah sarana operasional berupa kapal-kapal patroli dan helikopter serta berencana mendirikan Akademi Kelautan untuk mengisi kekurangan SDM kelautan. Indonesia berkeinginan dukungan yang diberikan AS berupa sistem pengawasan laut IMSS dapat terus berlanjut dan dapat melibatkan pula personel TNI dalam pemeliharaan dan pengembangannya.
- d. Permasalahan yang terjadi pada pengadaan pesawat F-16 berupa kerusakan *Canopy Seal Langeron* (CLS) pada 2 (dua) pesawat yang telah tiba di Indonesia dan beberapa pesawat yang masih dalam proses perbaikan di fasilitas AS menjadi perhatian bagi kedua pihak.
- e. *Peacekeeping Operation*. Indonesia kembali menegaskan keinginannya untuk dapat mengirimkan hingga 4000 *peace keepers* sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia di bawah PBB.
- f. *Defence White Paper*. Mengenai perkembangan Buku Putih Pertahanan RI tahun 2014, Indonesia menyampaikan secara garis besar susunan buku tersebut. Namun pihak Indonesia

menyampaikan bahwa Buku Putih 2014 yang telah disetujui oleh pemerintahan sebelumnya akan dilakukan revisi pada tahun 2015.

Pada tahun berikutnya, IUSSD ke-13 dilaksanakan pada tanggal 1-2 September 2015 di Hotel Borobudur Jakarta. Pertemuan kali ini membahas beberapa pokok seperti di bawah ini:

- a. Perkembangan pengadaan Alutsista program *Foreign Military Sales* yang sedang berlangsung yaitu pengadaan 24 unit pesawat F-16 C/D *Fighting Falcon* dan 8 unit helikopter Apache AH-64E.
- b. Kerjasama pendidikan dan latihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari program IMET. Pada tahun 2015 terdapat 33 jenis pendidikan/latihan dengan peserta sebanyak 420 orang. Selain melanjutkan kerjasama pendidikan/latihan yang sudah ada, pada tahun 2016 Kemhan mengusulkan 83 jenis kegiatan pendidikan/latihan yang dibutuhkan Kemhan/TNI dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang.
- c. Perjanjian Kerjasama Pertahanan/High-level Defense Cooperation. Indonesia dan AS menyetujui draft kerjasama dengan istilah "*Joint Vision Statement on Cooperative Activities in the Field of Defence between MoD of RI and DoD of USA*". Istilah tersebut digunakan untuk menghindari keharusan ratifikasi perjanjian dari Kongres Amerika Serikat.
- d. *Joint Vision* akan menjadi kerangka kerja guna peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika secara komprehensif yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara, yang sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing. Adapun lingkup kerangka kerjasama dimaksud, seperti kerjasama maritim, pengadaan alutsista pertahanan dan litbang gabungan, peningkatan profesionalisme personel, kerjasama di bidang Operasi Penjaga Perdamaian dan Latihan, bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat bencana, dan perlawanan terhadap ancaman trans-nasional.

Selanjutnya, dalam pertemuan IUSSD ke-14 yang dilaksanakan pada Tahun 2016, pokok bahasan meliputi antara lain:

1. *Deputy Assistant Secretary of Defense* Ms. Cara Abercrombie menyampaikan bahwa dukungan AS atas pembangunan kapasitas keamanan maritim Indonesia, disampaikan bahwa Indonesia yang kuat akan berdampak baik bagi kawasan dan juga baik bagi kepentingan AS. Pada kesempatan itu juga Indonesia menyampaikan bahwa kerja sama keamanan maritim Indonesia dengan AS sebagai implementasi dari *Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation* tahun 2015 merupakan hal yang krusial bagi penjagaan keamanan di kawasan.
2. Indonesia memberikan paparan terkait "*Indonesia Navy Roles on Global Maritime Fulcrum*". Dalam paparan, disampaikan bahwa pembangunan kapasitas keamanan angkatan laut akan terdiri dari beberapa fokus, yaitu peningkatan kehadiran di kawasan Kepulauan Natuna, pembangunan Industri Maritim, pembangunan kemampuan di wilayah timur Indonesia, serta pembangunan pulau terluar.
3. Menanggapi pertanyaan dari pihak AS terkait rencana *deployment* kekuatan militer Indonesia di kawasan Natuna, Ketua Delri (Delegasi Republik Indonesia) menyampaikan bahwa ke depan, aset-aset militer seperti keberadaan Batalyon Raider, Sistem Pertahanan Udara, KRI dan satuan pesawat tempur akan ditempatkan di kawasan Natuna.
4. Indonesia menyampaikan update terkait kerja sama trilateral RI dengan Malaysia dan Filipina untuk keamanan di kawasan Laut Sulu. Dalam paparan, disampaikan bahwa pokok kerja sama trilateral terpusat pada pelaksanaan patroli terkoordinasi (bukan *Joint Patrol*), pertukaran informasi intelijen, dan pengupayaan *hotline of communication*. Dalam tanggapannya, AS menyampaikan siap untuk membantu kerja sama trilateral dimaksud.

5. Amerika menyampaikan informasi mengenai *cybersecurity* dan memberikan *highlight* kepada pelaksanaan Latihan Bersama (Latma) Cope West antara USPACOM dengan TNI AU. Latma ini menjadi tonggak baru latihan TNI yang merupakan latma pertama menggunakan pesawat tempur pasca embargo AS beberapa tahun yang lalu. Terkait dengan hal ini, Delri menjelaskan bahwa Indonesia memandang penting kerjasama tersebut dan untuk bidang *cybersecurity*, perlunya pengaturan bilateral melalui *Letter of Intent* yang telah diusulkan Indonesia dimana diantaranya mengusulkan dialog mengenai Cyber.

Pada pertemuan IUSSD 2017, pokok-pokok bahasannya meliputi:

1. Perkembangan Operasi Maritim.  
Terkait kerjasama *Trilateral* di laut Sulu, Pihak AS memberikan dukungan dan menawarkan bantuan dalam *level* operasional baik secara bilateral maupun *Multilateral*. Pada kesempatan ini Indonesia menyampaikan inisiatif kerjasama “*Our Eyes*” mengenai kerjasama pertukaran intelijen yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand and Singapura untuk menangkal dan memerangi terorisme di kawasan.
2. Program Bantuan AS untuk Memelihara Keamanan Maritim.  
Selanjutnya Pihak Indonesia menyampaikan Program Bantuan AS Untuk Menjaga Keamanan Perairan Indonesia dalam kerangka *Maritime Domain Awareness* (MDA). Kebutuhan tersebut dapat diberikan melalui program Pendanaan Militer Asing (*Foreign Military Financing*, FMF) dan Inisiatif Keamanan Maritim (*Maritime Security Initiative*, MSI).
3. Perkembangan Korea Utara.  
Permasalahan ketegangan Semenanjung Korea merupakan permasalahan dunia yang paling strategis. Stabilitas Keamanan di Semenanjung Korea merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia terus mendukung upaya perdamaian

baik dalam forum *Bilateral* maupun *Multilateral*. Indonesia telah mengajukan beberapa inisiatif penyelesaian masalah melalui beberapa pendekatan yaitu melalui hubungan tradisional antara RI dan Korut yang telah terjalin sejak dulu dan melalui kerangka ASEAN. Indonesia menginisiasi pembentukan ASEAN *Foreign Ministers Statement* yang menghasilkan *Joint Statement* untuk mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea dan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

4. Kebijakan Deradikalisasi, Pandangan tentang Pejuang Asing dan ISIS di Asia Tenggara. ISIS telah mengeluarkan video mengenai rekrutmen yang dilakukan melalui media sosial. Dalam media tersebut dijelaskan secara detail mengenai panduan melakukan serangan. Terkait strategi ISIS di Asia Tenggara, pihak AS menjelaskan bahwa pendanaan ISIS untuk Asia Tenggara cukup besar dan hal ini menyebabkan para *Foreign Fighter* ingin kembali memperkuat jaringannya di kawasan. Kerjasama pertukaran informasi dalam kerangka kerjasama *Trilateral* diakui cukup efektif dalam mengatasi permasalahan terorisme di kawasan.
5. Pihak AS menjelaskan tentang mekanisme dan pembaharuan Perjanjian Kerjasama Pertukaran Informasi Militer (GSOMIA) yang terdiri dari 5 (lima) tahapan.

Pada IUSSD yang dilaksanakan tahun 2017 lalu, disepakati bahwa mulai tahun 2018, pejabat yang akan memimpin IUSSD adalah setingkat Sekjen. Melalui penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme forum komunikasi kedua negara sangat terstruktur dengan baik. Forum-forum ini membahas banyak hal mulai dari pendidikan dan pelatihan militer, saling tukar pikiran mengenai persepsi masing-masing negara akan suatu isu hingga mengevaluasi kerjasama atau kegiatan yang telah dilakukan bersama.

## 4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Data

### 4.2.1. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam tatanan *Confidence Building Measures (CBM)*

Embargo yang diberikan AS terhadap persenjataan beberapa tahun lalu membuat kerjasama pertahanan Indonesia tidak lagi terpaku hanya kepada AS saja, melainkan juga dengan negara lain, seperti Rusia, China, dan Perancis. Dapat dilihat beberapa waktu lalu Indonesia membeli Sukhoi SU-35 dari Rusia. Dan pemerintah Indonesia memastikan bahwa pembelian ini tidak mempengaruhi hubungannya dengan AS. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan bahwa tidak akan ada embargo, karena Indonesia dengan semua negara baik-baik, begitu pula dengan AS. Hubungan baik dengan AS dalam bidang pertahanan juga ditunjukkan pada saat pertemuan G20 di Jerman dimana Presiden Joko Widodo diberi penawaran untuk pembelian pesawat buatan AS (Erdianto, 2017).

Sebagaimana Robert Blake, duta besar AS untuk Indonesia, menilai bahwa tidak ada lagi kesulitan dalam kesepakatan atau kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Ia mengatakan bahwa embargo bukan lagi masalah antara kedua negara tersebut dan hal tersebut ditunjukkan dengan dijualnya helikopter Apache oleh AS ke Indonesia. "Helikopter itu dijual tanpa ada syarat di Indonesia. Ini menunjukkan ada perkembangan positif dari kondisi HAM di Indonesia" lanjut Dubes Blake (Nugraha, 2015)

Untuk isu mengenai pembatasan Kopassus, Blake membantah hal tersebut. Dubes Blake menegaskan "Bahkan dengan kopassus akan ada perkembangan baru. Sekali lagi tidak ada lagi masalah embargo. Kami siap bekerjasama dengan Indonesia, termasuk menjual (jet tempur) F-16 V, yang jenis terbaru dan tak pernah ditawarkan ke negara lain" (Nugraha, 2015).

Sebagaimana yang disebutkan pada latar belakang bahwa AS masih memberlakukan kebijakan *human rights vetting* terhadap Indonesia dimana beberapa militer atau pejabat Indonesia tidak bisa masuk ke negeri Paman Sam tersebut. Sedangkan dalam suatu kerjasama

seharusnya ada kesetaraan antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan opini ini.

“Karena stakeholder di AS itu bukan hanya pemerintah, tapi juga ada kongres. *Leahy law* itu sebenarnya keluaran kongres AS. Jadi kadang-kadang apa yang diinginkan oleh pemerintah eksekutifnya AS itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kongres AS. Misalnya UNCLOS, itu sebenarnya kalau pemerintah AS sendiri ingin menandatangani UNCLOS. Tapi kongresnya tidak ingin”. (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

“AS merupakan negara yang besar, sehingga meskipun kita (pihak Indonesia) sudah diizinkan masuk oleh Menhan As, akan tetapi apabila ada satu lembaga yang melarang, maka kita tetap tidak bisa masuk”. (Prayogo, wawancara personal, 2017)

Dalam pertemuan-pertemuan bilateral Indonesia dan AS, *Human right vetting* ini tidak dibicarakan secara khusus, melainkan dengan terus menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi militernya. Dalam berbagai kesempatan Indonesia selalu menunjukkan perkembangan demokrasi, khususnya dalam hal profesionalisme TNI. Dan dari pemerintah AS sendiri sudah melihat perkembangan tersebut, ditunjukkan dengan kunjungan pejabat pemerintahan AS ke Indonesia dan apresiasi yang mereka ungkapkan akan kemajuan demokrasi maupun profesionalitas militer Indonesia. Bentuk kepercayaan AS itu sendiri dapat dilihat dari sudah banyaknya pendidikan dan pelatihan militer yang dilakukan kedua negara, dan juga kepercayaan AS untuk menjual alutsista mereka ke Indonesia.

“Ya tentu *Leahy Law* itu sangat... ini ya karena dia (AS) melakukan vetting terhadap militer negara lain atas dasar ya mereka bilang ya pelanggaran HAM. Itu selalu menjadi satu alasan dalam, ya pembahasan dalam artian kita akan berupaya meningkatkan profesionalitas TNI, dan salah satu intinya adalah untuk peningkatan pemahaman HAM di kalangan militer dengan AS. Itu termasuk dalam CBM yang kita bangun tadi.” (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

Melihat banyaknya kerjasama bidang pertahanan yang kembali dibuka antara Indonesia dan AS, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua

negara di bidang pertahanan sangat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal tersebut juga sejalan dengan CBM yang terbangun oleh kedua negara ini yang terus mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan adanya mekanisme yang semakin terstruktur, seperti adanya annual meeting di bidang pertahanan yaitu IUSSD, lalu di tingkat mabes TNI ada USIBDD, di tingkat Menteri Luar Negeri ada forum *joint comission*. Kemudian, dari forum-forum dialog tersebut terdapat kerjasama turunan seperti kerjasama pertahanan di bidang maritim, teknologi pertahanan, dan juga keamanan.

“CBM kita juga cenderung meningkat kalau saya lihat, karena apa namanya mekanismenya semakin terstruktur, kalo misalnya untuk di pertahanan ada IUSSD ada USIBDD terus juga banyak turunannya lain-lain seperti kerjasama pertahanan maritim, kerjasama dibikin *working group* lagi untuk *defense technology, security* dan lain sebagainya.” (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

“CBM Indonesia dan AS sudah mengalami kenaikan, sudah banyak perkembangan karena kita sudah banyak melakukan kemajuan setelah di Timtim. Sudah banyak yang kita lakukan. Setelah kasus itu (Timtim) tidak ada restriksi yang khusus untuk Indo, karena kita tidak ada masalah-masalah yang menonjol. Hanya kadang-kadang mereka melihat, misalnya mengkritik apa yang terjadi di kita. Misalnya kemarin kasus Ahok, atau misalnya kasus Ahmadiyah. Itu kan masuk di mereka yah, masuk ke catatan mereka. Tapi tidak pada level menjadi pra syarat pembelian alutsista. Belum pada level sampai kembali kepada kasus Timtim dulu.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini CBM kedua negara sudah cukup baik dilihat dari forum dialog atau komunikasi yang dimiliki oleh Indonesia dan AS dengan mekanisme yang sudah bagus pula. Hal ini dibenarkan oleh Kasubdit Bilateral, Ditkersin, Ditjen Strahan, Kementerian Pertahanan, Yudi Yulistyanto yang mengatakan “Kalau mekanisme bakunya sudah cukup bagus” (Yulistyanto, wawancara personal, 2017).

Salah satu forum dialog yang dijalankan kedua negara adalah IUSSD yang dilaksanakan tiap tahunnya dan diadakan di Indonesia atau AS secara bergantian. Kegiatan bilateral ini dikoordinasikan oleh Kemhan dan dipimpin oleh pejabat setingkat Dirjen. Forum ini merupakan forum

andalan kedua negara karena dapat mempererat kerjasama kedua negara dan juga menjadi wadah komunikasi keduanya.

Kemudian selain IUSSD, Indonesia-AS juga memiliki forum bilateral lain yang dikoordinasikan oleh Mabes TNI yang disebut dengan USIBDD (*United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion*). Panglima TNI sebagai Ketua Delegasi dan Co-Host, Dirjen Strahan Kemhan sebagai anggota delegasi. Kasubdit Bilateral Ditkersin Ditjen Strahan mengatakan bahwa USIBDD itu sebenarnya lebih teknis lagi. Itu masalah perlakuan informasi, perlakuan teknologi strategis. Jadi itu cuma bisa informasi sama teknologi saja, ga ada yang lain. (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Selanjutnya, forum dialog lain yang dibentuk oleh kedua negara ini adalah *Joint Commission Meeting* (JCM) yang merupakan kegiatan bilateral Indonesia-AS yang diselenggarakan tiap tahun dan dikoordinasikan oleh Kemenlu. Menteri Luar Negeri sebagai Ketua Delegasi dan *Co-Host* beranggotakan diantaranya Dirjen Strahan Kemhan sebagai *Co-Chair Working Group on Security*. Forum ini merupakan satu forum yang memfasilitasi hubungan kedua negara agar lebih tertata secara terencana dalam mengembangkan kerjasama di berbagai lini dalam mencapai kepentingan nasional mereka. Forum ini membahas hubungan kedua negara dan membahas masalah-masalah di kawasan. Selain itu, forum ini juga memiliki enam kelompok kerja yang masing-masing akan melaporkan baik masalah maupun perkembangan di bidangnya (Mazrieva, 2012).

Selain forum-forum yang dijelaskan di atas, pemerintah Indonesia dan AS juga kerap kali melakukan kunjungan kenegaraan untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk menyepakati suatu keputusan bersama. Duta besar untuk isu perempuan global, Catherine Russell, berkunjung ke Bali, pada tanggal 5-9 September 2013 untuk berpartisipasi dalam *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Women and the Economy Forum* (WEF). Kemudian pada 12 September tahun yang sama, asisten sekretaris negara untuk hubungan Asia Timur dan pasifik, Daniel Russel, melakukan kunjungan bilateral di Indonesia untuk berdiskusi dengan

pejabat senior pemerintahan Indonesia mengenai berbagai masalah bilateral dan regional. Disusul oleh Sekretaris negara, John Kerry, berkunjung ke Bali, Indonesia pada 4 Oktober 2013 untuk menghadiri *Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting (AMM)*, dan pertemuan terkait APEC lainnya. APEC adalah sebuah forum yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Mempromosikan perdagangan dan investasi di Asia Pasifik tetap menjadi komponen kunci dari kebijakan rebalance A.S. Sekretaris tersebut berpartisipasi dalam berbagai pertemuan multilateral dan bilateral dengan pejabat dari negara anggota APEC (U.S. DoS, 2017).

Kemudian, pada tanggal 13-20 Februari 2014, Sekretaris Negara John Kerry pergi ke Seoul, Beijing, Jakarta, Abu Dhabi, Tunis, dan Paris untuk bertemu dengan pejabat pemerintah senior dan menangani berbagai isu bilateral, regional, dan global. Ini adalah perjalanan kelima ke Asia untuk Sekretaris dalam satu tahun terakhir. Di Jakarta, Sekretaris tersebut mengulangi bahwa Amerika Serikat menghargai kepemimpinan Indonesia yang terus tumbuh dalam tantangan global dan berharap dapat terus bekerja dengan Indonesia mengenai isu-isu termasuk perubahan iklim, keamanan, demokrasi, integrasi regional, dan hak asasi manusia. Dia memimpin dalam Rapat Komisi Bersama di bawah Kemitraan Komprehensif AS.-Indonesia. Dia juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan kami dengan institusi multilateral Asia saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pada tahun berikutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan ke AS pada 7-15 Mei 2015. Pada kunjungannya kali ini, Menhan akan bertemu dengan sejumlah pihak dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Dalam pertemuannya tersebut, Sejumlah isu akan dibicarakan seperti penanganan isu-isu strategis yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia antara lain terorisme, bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi (detiknews, 2017).

Menhan Ryamizard kembali mengunjungi AS bersama pada tanggal 26 Oktober 2015 dan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan

AS Ash Carter untuk membicarakan hal-hal terkait dengan upaya memperkuat hubungan pertahanan kedua negara termasuk membahas peluang-peluang untuk memperluas kerjasama kedua negara seperti pada bidang perdagangan, teknologi, keamanan maritim, serta keamanan siber. Selain peluang dalam kerjasama bilateral, Menteri Pertahanan kedua negara juga membahas hambatan dalam melaksanakan latihan gabungan serta kelanjutan pengadaan alat pertahanan. Pada akhir pertemuan kedua Menhan menandatangani Pernyataan bersama Mengenai Kerja Sama Komprehensif Bidang Pertahanan (*Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation*). Pernyataan ini meliputi lima pilar: kerjasama maritim, penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana, modernisasi pertahanan serta melawan ancaman transnasional (U.S. Department of State, 2010).

Dalam rangka memenuhi undangan Presiden Barack Obama, Presiden Joko Widodo berkunjung ke AS pada tanggal 26 Oktober 2015. Dalam kesempatan kali itu kedua Presiden melakukan pertemuan di Gedung Putih dan menyetujui beberapa pernyataan bersama, antara lain mengenai pernyataan bersama tentang comprehensive pada kerjasama pertahanan yang di tandatangi oleh Menhan RI dan Menhan AS. Pada pertemuan ini, Presiden AS dan Presiden RI menyadari bahwa Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia perlu ditingkatkan dan kedua negara perlu senantiasa memperdalam hubungan berdasarkan keuntungan bersama dan rasa saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan ini, kedua Presiden berkomitmen untuk menyusun Kemitraan Strategis antara kedua negara, untuk memperluas kerja sama dalam bidang strategis yang menjadi kepentingan bersama. Keduanya juga menyetujui dibentuknya Dialog Strategis Menteri (*Ministerial Strategic Dialogue*) tahunan, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, di samping pertukaran tingkat menteri lainnya, sebagai wadah diskusi dan kolaborasi dalam upaya-upaya strategis untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan internasional, sekaligus prioritas bilateral (U.S. DoS, 2010)

Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45 menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan, bahkan penolakan datang dari dalam negeri sendiri. Hal tersebut disebabkan Trump kerap kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Seperti mendeportasi imigran, membangun tembok perbatasan antara AS dan Meksiko, hingga mengatakan bahwa AS akan meninggalkan sekutu-sekutunya (Muhamad, 2016). Sikap Trump ini tidak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga menjadi kekhawatiran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pemerintahan Trump dengan kebijakan-kebijakannya menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti mengenai bagaimana hubungan Indonesia dan AS kedepannya.

Salah satu yang menjadi perhatian Indonesia dan mungkin negara lain adalah kebijakannya mengenai *Islamophobic rhetoric*, yaitu Trump mengeluarkan perintah eksekutif atas larangan bagi tujuh negara berkependudukan mayoritas Muslim untuk datang ke AS. Adapun tujuh negara tersebut adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman (Hutapea, 2017).

Kebijakan Trump ini juga membuat negara-negara di Eropa khawatir, karena di satu sisi mereka terdesak dengan perkembangan pesat jumlah warga Muslim, dan di sisi lain ada peningkatan sentimen nasionalis dari kelompok yang menentang imigrasi warga Muslim (Ramirez, 2017). Begitu pula dengan Indonesia, walaupun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terkena larangan tersebut, akan tetapi efek dari kebijakan tersebut dirasakan oleh warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam; beberapa warga Indonesia mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studi di AS atau sekedar berkunjung ke negeri tersebut. Meskipun konsekuensi lonjakan sentimen anti-Amerika di Indonesia sulit diprediksi, resiko tersebut perlu mendapat perhatian khusus (Harding dan Sutton, 2017, hal. 1-4).

Hal ini juga dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, karena AS itu memahami bahwa semua negara Islam itu menganut Islam yang sama seperti Islam di negara-negara Timur Tengah. Dan hal ini

sangatlah tidak menguntungkan untuk Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri, Leonard Felix Hutabarat:

“Bagi Trump, dia lebih kepada kampanye-kampanye *counter-terrorism*, yang sifatnya *hard power*, model pendekatannya. Dan dalam *soft power*, Indonesia dapat menjembatani kasus ataupun pandangan yang terkait dengan Islam moderat, karena Amerika Serikat pemahamannya melihat Islam di Indonesia sama dengan Islam di Timur Tengah. Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi Indonesia.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Kemudian ia melanjutkan bahwa Indonesia tengah mencoba untuk menunjukkan kepada Trump bahwa Indonesia itu berbeda dengan Timur Tengah. Ditambah lagi Indonesia berusaha untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjembatani persepsi dan kepentingan AS mengenai Islam di Timur Tengah, dimana AS mengalami kesulitan untuk berinteraksi langsung dengan negara-negara Timur Tengah tersebut dan Indonesia bisa menjadi mitra bagi AS dalam hal ini.

“Indonesia sedang mencoba, dalam hal *soft power*, untuk menjembatani ketika terjadi konflik antara Sunni dan Syiah atau antara Arab Saudi dengan Iran. AS butuh mitra disitu karena mereka susah untuk masuk. Diharapkan peran Indonesia dalam hal tersebut dapat menonjol. Itu yang sedang kita coba lakukan terhadap AS, khususnya yah.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi AS mengenai apa yang terjadi di Indonesia itu berbeda dengan yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, hal yang dilakukan Indonesia juga dapat berguna bagi AS, misalnya bagaimana Indonesia menangani permasalahan atau isu-isu agama, bagaimana pelaksanaan toleransi beragama di Indonesia, dan bagaimana Kementerian Agama bekerja menangani isu-isu tersebut. Hal tersebut akan memberikan pemahaman kepada AS mengenai apa yang terjadi di Indonesia merupakan hal berbeda dengan apa yang terjadi di tempat lain. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran juga bagi pihak AS. Pemahaman ini menjadi penting bagi Indonesia karena Indonesia memiliki kepentingan dengan AS dimana banyak warga negara Indonesia yang

tinggal di AS. Sehingga, apabila AS menyamaratakan semuanya atau semua dijadikan ancaman, bisa saja AS memberikan tekanan terhadap warga negara Indonesia di sana. Tentu akan merugikan pihak Indonesia.

“Jadi, kita memerlukan *engagement* yang positif juga dengan amerika di bidang itu. Supaya AS melihat Indonesia bahwa apa yang berbeda dengan Indonesia, bagaimana Indonesia menangani permasalahan, Amerika juga bisa melihat cara penanganan yang berbeda oleh Indonesia.” Lanjutnya. (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Pemerintahan AS memiliki struktur yang berbeda dengan pemerintahan Indonesia dimana AS tidak memiliki Kementerian Agama, bagi AS agama itu merupakan wilayah privasi, sehingga mekanisme yang ada di Indonesia dapat dijadikan pelajaran. Dan Ia bisa melihat penyelesaian isu-isu agama yang diselesaikan tidak hanya melalui jalur pemerintahan, melainkan juga lewat *people society* seperti MUI, NU, atau Muhammadiyah.

“Bagaimana AS melihat apa yang dilakukan oleh Indonesia. pengaruh *people society* kita penting. Amerika perlu juga memberdayakan komponen itu di masyarakatnya, yang bahkan juga membantu kebijakan pemerintah eksekutif. Pertama Kita juga coba meyakinkan ke mereka penangan mengenai *extreme pilot* ataupun *counter-terrorism*. Itu juga harus dilakukan melalui *people society*, dengan begitu akan lebih efektif. Melihat apa yang menjadi *concern*, bagaimana melihat permasalahan itu dari kaca mata Indonesia. jadi mereka juga perlu menjalin kerjasama.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Jadi, pada pemerintahan Trump ini, dalam urusan *counter-terrorism*, Indonesia bisa mendorong upaya penyelesaiannya melalui *soft power*, misalnya melakukan kerjasama dengan institusi seperti yang dilakukan Pemerinta Indonesia dengan UIN Syarif Hidayatullah. AS perlu melihat ini, pemahaman Indonesia seperti apa. Inilah salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang harus ditonjolkan pada era Trump ini.

Selain berusaha untuk meyakinkan pihak AS dalam merubah persepsi mengenai negara Muslim, Pemerintah Indonesia bukan hanya melakukan pendekatan kepada Pemerintahan AS, tapi juga melakukan upaya komunikasi atau diskusi dengan para pemuka agama di AS.

Sebagaimana diketahui bahwa struktur atau model pemerintahan AS berbeda dengan Pemerintahan Indonesia dimana AS tidak memiliki Kementerian Agama atau lembaga yang mengurus isu-isu agama, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian pertemuan antara para pemuka agama ini diwakili oleh perwakilan dari berbagai agama yang ada, baik dari KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), dari PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), Hindu, Budha, dan juga Islam.

“*Interpret dialogue* kan sudah dijalankan dengan Indonesia. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada komunitas agama yang ada di Amerika Serikat disana. Ada wadahnya, jadi ada mekanisme kerjasamanya. *Interpret dialogue* dilakukan dengan Amerika Serikat. Dan ulama-ulama kita disana juga melakukan pertemuan dengan ulama ataupun dewan ulama yang ada di AS. Mereka tidak bagian pada pemerintahan memang, tapi mereka punya komunitas sendiri juga di AS. Nah komunitas itu dicoba dijalin antara Indonesia dengan Amerika, untuk memberikan pemahaman.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Kebijakan pemerintahan Trump tidak lagi terlalu fokus kepada masalah demokrasi, HAM, atau masalah teknis lainnya yang pada zaman terdahulu sering menghambat kerjasama kedua negara. Persyaratan khusus yang sering diberikan dalam prasyarat pengembangan kerjasama tidak terlalu ditonjolkan oleh Presiden yang berasal dari partai republik ini. Pada era Presiden Trump ini, kerjasama itu yang penting adalah bisa menghasilkan benefit ekonomi, dan juga Trump sangat tertarik dengan kerjasama *counter-terrorism*. Seperti yang dikatakan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Leonard F Hutabarat, “Pemerintahan Presiden Trump agak berbeda, Republik itu tidak seperti Demokrat, Demokrat banyak masalah demokrasi, HAM dalam prasyarat pengembangan kerjasama. Kalo di era Trump sekarang, lebih fokus kepada hal yang dapat menghasilkan benefit ekonomi atau kerjasama *counter-terrorism*.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Selain mengenai *Islamophobic rhetoric*, Presiden Trump juga mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menyebabkan defisit di negaranya. Indonesia masuk ke dalam daftar

kontributor utama defisit perdagangan global AS (Harding dan Sutton, 2017, hal.1-4). Indonesia berada pada posisi ke 13, sedangkan yang paling atas itu seperti Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Mengenai hal ini, pemerintahan Trump akan berusaha mencari jalan untuk memperbaiki perekonomian dalam negerinya. Mereka akan berusaha untuk menyeimbangkan hal tersebut, karena selama ini surplus berada di Indonesia. AS saat ini berpandangan bahwa ia ingin menghukum negara-negara yang menyebabkan defisit kepada AS.

“Indonesia berada pada urutan ke-13, masih panjang. Pada grup pertama penyebab defisit Amerika Serikat, antara lain Cina, Jepang, Korea. Negara-negara ini (di grup pertama) akan “diselesaikan” terlebih dahulu oleh Trumo. Jadi yang pertama. Yang kedua dengan Uni Eropa juga ada. Nah Indonesia berada pada grup ketiga. Tetapi tidak terlalu besar defisitnya. Tapi pemikirannya cukup bahaya bagi Presiden Trump.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Defisit ini terjadi karena pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan. Jadi, dalam hal AS ini, negaranya lebih banyak membeli barang dari Indonesia dibandingkan dia mengekspor barang ke Indonesia. Sehingga, surplus berada di Indonesia. Hal ini bisa saja terjadi karena kebetulan barang yang mereka jual bukan merupakan barang yang kita inginkan, atau barang yang kita butuhkan tidak dimiliki atau tidak dijual oleh mereka, sehingga kita membeli barang tersebut dari negara lain. Menurut Hutabarat, defisit sesungguhnya bukan hal yang jelek atau membahayakan, seperti yang ia ungkapkan pada kesempatan beberapa waktu lalu.

“Defisit itu bukan sesuatu yang buruk atau membahayakan. Tidak mungkin semua orang bisa jual sesuatu ke negara lain, kita beli semua. Kita jual barang mentah kepada AS, tapi belum tentu semua kita beli dari AS. Apabila AS hanya menjual senjata, tidak mungkin semua senjata kita beli, mungkin hanya beberapa saja, yang lain barang-barang pertanian. Akan tetapi, AS tidak menjual barang pertanian, maka dari itu Indonesia beli di negara lain. Hal tersebut akan menyebabkan defisit, tidak berimbang. Di satu sisi AS tidak ingin demikian, seharusnya kalo AS membeli satu juta, ya Indonesia juga membeli satu juta. Barang yang diperjualkan belum tentu komplementar, jadi dia kebanyakan kan barang yang *high end*, yang teknologi tinggi persenjataan. Jadi, kondisinya seperti itu”. (Hutabarat, wawancara personal, 2017).

Hal tersebut perlu diperhatikan oleh Indonesia karena dapat berdampak pada pertahanan negara, melalui bidang ekonomi. Hal ini bisa berdampak pada perekonomian negara apabila Presiden Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal proteksi perekonomian negaranya yang akan menghambat nilai atau jumlah ekspor barang Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pengamat politik CSIS, Phillips J Vermonte, yang berpendapat bahwa dari segi politik ekonominya, Trump akan membuat kebijakan yang menjadikan biaya barang impor atau barang yang masuk ke AS lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk menumbuhkan industri negara paman sam itu. “Dia mau proteksionism, barang yang masuk akan dikenai biaya yang tinggi. Itu dia buat untuk menumbuhkan industri AS”. Imbuhnya (Artanti, 2017).

Hal ini pula yang diungkapkan oleh Kepala Pusat Kajian AMEROP saat ditanyakan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh Presiden Trump terhadap retorika proteksinya.

“Sekarang Trump ingin melakukan tekanan untuk penyeimbangan itu. Dia melakukan kenaikan pajak yang tinggi untuk CPO (*Crude Palm Oil*) Indonesia, kemudian ada yang bio-diesel, dia sudah melakukan hambatan-hambatan untuk mengajak bicara. Dengan tujuan “ini bagaimana ni, saya tidak mau begini terus keadaannya, Indonesia bisa berikan apa? Saya mau jual ini””. (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia menyarankan kerjasama ekonomi di sektor lain, investasi menjadi salah satu pilihan. “Jadi kita menyarankan untuk menyeimbangkan hubungan dagang itu dengan investasi biasanya. Apabila kita banyak menjual barang ke AS, maka AS invest lebih banyak. Hal itu akan membuat perimbangan. Karna dalam jangka menengah, jangka panjang kan keuntungan masuk. Jadi sekarang intinya begitu, ketika perdagangan tidak berimbang, ada defisit surplus, investasi masuk sebagai penyeimbang.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain, seperti Rusia. Dan hingga pertengahan tahun 2017 lalu, perdagangan kedua negara mengalami peningkatan yang cukup baik. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Rusia mencatat surplus USD 77,45 hingga Mei 2017 dengan peningkatan volume perdagangan sebesar 54,43 persen atas USD 1,12 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, mengatakan bahwa kerjasama Indonesia dengan Rusia merupakan peluang yang cukup besar dan harus diambil oleh pemerintah Indonesia, mengingat Rusia tengah menghadapi embargo ekonomi oleh AS dan Eropa. “Betapa pentingnya kerjasama ini di tengah mereka bermasalah dengan AS dan Eropa dan kita datang sebagai kawan” tegasnya (Anggraini, 2017).

Semua upaya kerjasama perekonomian yang dilakukan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negeri, baik dengan cara investasi ataupun perdagangan. Hal ini pula sempat dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L Marsudi, pada pidato pertamanya (29/10/2014) bahwa RI akan menjalankan kebijakan diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dengan meningkatkan dan memperluas akses pasar bagi produk Indonesia, baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral (Alhaidar, 2014).

Selain isu yang terjadi di antara kedua negara, isu dalam negeri juga dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan Indonesia – AS. Peristiwa pemilu Gubernur DKI Jakarta awal tahun 2017 lalu menimbulkan berbagai interpretasi dari negara-negara di dunia, termasuk AS. Banyak yang berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Pemilu ini dianggap sebagai ujian toleransi agama, etnik, dan politik dalam negeri. Lebih jauh lagi, hal tersebut membuat reputasi Indonesia sebagai negara Muslim paling toleran dipertanyakan oleh negara-negara Barat seperti AS (Parameswaran, 2017).

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran negara di dunia bahwa kelompok Islam garis keras akan terus berusaha menggunakan agama sebagai senjata politik. Hal ini ditakutkan akan mendorong kebangkitan dari kelompok-kelompok terorisme seperti al-Qaeda, yang telah dihapuskan oleh pemerintah Indonesia secara efektif (The Editorial Board, 2017).

Pendapat berbeda diutarakan oleh Hutabarat, yang mengatakan bahwa hal demikian wajar karena demokrasi di Indonesia masih terbilang muda, sehingga sangatlah mungkin apabila Indonesia menemukan berbagai tantangan dalam proses pembelajarannya. Hal yang terpenting adalah Indonesia terus berupaya untuk menerapkan demokrasi di berbagai aspek politik ataupun pemerintahan. Sejalan dengan hal itu, Indonesia menunjukkan bahwa proses-proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Indonesia meyakinkan Amerika Serikat, demokrasi Indonesia itu berjalan, diperjuangkan *step by step* yah. Waktu, usianya belum cukup lama, dan tantangan pasti ada. Tapi kita menuju arah yang sama, *directionnya* sudah sesuai dalam proses-proses demokrasi. Itu yang kita coba tekankan kepada Amerika serikat.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Berjalannya demokrasi di Indonesia juga dapat dilihat dari cara penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia, model penyelesaiannya tidak seperti dahulu, belum melakukan apa-apa tapi orangnya sudah ditangkap. Hal ini justru akan mengurangi nilai demokrasi itu sendiri. Kecuali jika itu mengarah kepada pelanggaran hukum atau pidana dan mengganggu kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mengambil tindakan. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Kepala Pusat Kajian AMEROP,

“Pada zamannya Presiden Soeharto, baru memiliki niat saja, belum melakukan apa-apa sudah ditangkap. Itulah yang membedakan. Akan tetapi, risikonya kejadian dulu baru setelahnya dilakukan. Ada kejadian dulu, itu yang sering kali dianggap sebagai “mundur atau tidak dari pada masa lalu, karena butuh pembuktian sudah terjadi baru ditangkap”. (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Pada 20 April 2017, sehari setelah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Wakil Presiden AS, Mike Pence, melakukan kunjungan kenegaraan ke negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Duta Besar AS, Joseph R. Donovan, menegaskan bahwa kunjungan Wapres AS ini tidak ada kaitannya dengan Pilgup DKI. Melainkan, Pence akan membahas mengenai kerjasama bilateral dan juga membahas isu-isu politik dengan Indonesia, serta pembahasan mengenai sosial budaya. Di tengah polemik sejumlah kebijakan Presiden Trump, Indonesia menjadi satu-satunya negara mayoritas Muslim yang dikunjungi pemerintah AS (Michaela, 2017). Kunjungan ini dianggap sebagai komitmen AS dalam kemitraannya dengan Indonesia.

Dalam beberapa pertemuan, baik AS maupun Indonesia seringkali menegaskan komitmen masing-masing negara dalam kemitraan yang mereka sepakati. AS memang mitra penting bagi Indonesia, begitu pula dengan Indonesia. Indonesia sendiri sangat bergantung dengan AS, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan. Akan sulit bagi Indonesia untuk lepas ketergantungan dari produk-produk AS. Dapat dilihat mata uang devisa yang digunakan Indonesia itu adalah US dollar, itu berarti mayoritas pembayaran kita menggunakan US dollar.

“40% perdagangan kita dengan Amerika Serikat. Artinya, mata uang devisa kita itu dengan US dollar, itu menentukan mata uang devisa, pembayaran dan segala macamnya berdasarkan 40 sampai 60% perdagangan kita dengan siapa. Jadi, kalo kita pake alat tukarnya US dollar, berarti 40-60% ketergantungan ekonomi kita dengan si pemilik dollar.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Sehingga, tidak bisa Indonesia putus produk-produk AS, bisa mengakibatkan negaranya *collapse*. Karena semua barang Indonesia dikirimkan ke AS atau ke Cina. Satu samal lain saling membutuhkan. Sama halnya, Indonesia tidak bisa mendoakan perekonomian AS jelek, karena apabila AS mengalami kesulitan, Indonesia pun akan mengalami imbasnya, bahkan bisa lebih parah.

“Istilah kasarnya, apabila Amerika misalnya kena batuk – batuk biasa, kita sudah muntah-muntah, batuk darah. Begitu pula dengan Cina. Oleh karena itu, kedua negara tersebut tidak boleh terjadi apa-

apa, karna ekspor kita ke dua negara tersebut. Kecuali kita bisa rame-rame ke Timur Tengah atau ke Rusia. Akan tetapi, apabila dilihat dari statistik, ekspor kita ke Timur masih kecil, lebih besar ekspor kita ke AS, Cina, Jepang. Dan 45, 50 tahun hanya negara ini saja, baru 10 tahun terakhir India masuk.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017).

Pada intinya, kemitraan strategis yang telah dibangun Indonesia dan AS harus tetap dijaga, demi kepentingan masing-masing. Karena tidak dapat dipungkiri masing-masing negara masih membutuhkan satu sama lain bukan hanya di bidang pertahanan dan perdagangan, tapi banyak bidang lainnya seperti politik misalnya.

“Pada bidang lain, AS juga membutuhkan Indonesia di kawasan. Karena kepentingan AS di Asia Pasifik itu sudah tinggi. Jadi kita bekerjasama dengan AS bagaimana mendukung stabilitas. Karena apabila tidak stabil, Indonesia akan terganggu di kawasan, mengganggu kepentingan AS juga. Sehingga, kita harus bekerjasama dengan AS karena Indonesia juga bergantung dengan AS, khususnya investasi dan perdagangan.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Sehingga, untuk beberapa tahun kedepan, hubungan antara AS dan Indonesia diprediksi akan baik-baik saja. Ditambah dengan kebangkitan Cina, ini tentu menjadi perhatian AS karena AS ingin tetap mempertahankan posisi dan perannya di kawasan Asia Pasifik, dan Indonesia memiliki peran penting disana yaitu untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam hal ini Indonesia dituntut untuk tidak berpihak kepada negara manapun sesuai dengan arah politik Luar Negeri yang dianutnya selama ini yaitu bebas aktif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pemangku kepentingan dalam negeri baik dalam hubungan Indonesia-AS secara luas ataupun spesifik dalam bidang kerjasama pertahanan.

“Amerika menginginka demikian, mereka ingin kepentingannya ada di seluruh dunia, tidak hanya di satu tempat. AS harus menjajah semua, jalur logistiknya, jalur yang lain-lain juga. Sama halnya dengan Cina, sekarang Cina lebih agresif. Cina menginginkan pengaruh secara global dalam hal ekonomi, akan tetapi dalam politik global tinggi dalam hal ekonomi saja tidak cukup, harus menunjukkan pengaruh kekuatan politik global dan militer. Itu yang

bisa *say something* ke dunia ini.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

“Kalau dikatakan apakah kebijakan Trump berpengaruh? Pasti berpengaruh. Apalagi yang terakhir ini dia mengancam akan mengurangi bantuan, pasti berpengaruh. Tapi bahwa kepentingan mereka lebih besar, dia (AS) akan rugi banyak” (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Kemudian, Yulistyanto menjelaskan apabila AS mengurangi *engagement* dengan Indonesia, maka akan banyak efek domino yang akan terjadi, seperti AS akan kehilangan salah satu mitra dalam penanggulangan ISIS karena Indonesia termasuk *focal point* dalam hal tersebut. Kemudian dalam isu Laut China Selatan, Indonesia turut berpartisipasi untuk menetralsir keadaan di kawasan. Sehingga, Yudi menyimpulkan bahwa kalau dalam hal diplomasi pertahanan, AS tidak akan meninggalkan Indonesia, tapi jika secara politik, kemungkinan AS meninggalkan Indonesia masih ada. Jadi ada perbedaan antara politik dan diplomasi. “Jadi kita harus membedakan diplomasi Negara dengan diplomasi pertahanan” Tegasnya. (Yulistyanto, wawancara personal, 2017).

AS tidak bisa mengabaikan posisi strategis Indonesia di kawasan, dan begitu juga sebaliknya, Indonesia memandang AS memiliki peran penting bagi keamanan kawasan. Arti strategis yang melingkupi hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Trump (Muhamad, 2016).

“Sehingga saya yakin, walaupun keputusan politik Trump seperti itu, secara pertahanan dia tidak akan meninggalkan kita karena kerugiannya akan lebih besar. Bukan hanya untuk kepentingan AS di Indonesia, tapi kepentingan AS di region juga, itu harga yang lebih besar, harga yang lebih mahal.” (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, bahwa kebijakan politik bebas aktif yang dianut Indonesia saat ini bukan lagi mengenai pilihan antara Barat atau Timur, akan tetapi lebih kepada kebebasan untuk mengambil sikap demi kepentingan

nasional Indonesia. Jadi wujud dari pelaksanaan politik itu adalah kita memiliki hubungan baik dengan AS, Rusia, India, Tiongkok, dll. “bebas aktif era sekarang itu lebih kepada bagaimana kita memelihara kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan kita melibatkan negara-negara ini, kita justru bisa mengamankan kepentingan kita”. Tegasnya (Mazrieva, 2012).

Muhammad Jaki Nurhasya, Diplomat pertama bidang politik keamanan AS, berpendapat bahwa naiknya Trump menjadi Presiden AS dan dengan kebijakannya tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap CBM kedua negara yang sudah terbangun.

“Sebenarnya kalau mekanisme sudah *establish*, saya tidak melihat ada begitu banyak naik turun yang berarti. Cuma memang persepsi publik saja yang sangat naik turun dengan naiknya Trump ini” (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

Tapi di sisi lain, memang tidak bisa dipastikan bahwa 5 atau 10 tahun ke depan hubungan kedua negara akan terus stabil atau justru akan mengalami penurunan. Atau apakah kebijakan politik Trump kedepannya akan berpengaruh atas kerjasama pertahanan kedua negara.

“Hal tersebut belum dapat dipastikan (apakah kedepannya hubungan Indonesia dan AS akan baik-baik saja). Kalau misalnya ternyata mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial dalam bidang pertahanan seperti kemarin mereka tidak lagi memperpanjang *waiver* untuk Palestina. Itu kan kebijakan yang bernilai *strategic shock* terhadap hubungan bilateral”. (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

Selanjutnya, Terhadap isu Palestina, posisi Indonesia jelas yaitu mendukung secara konsisten atas kemerdekaan Palestina. Indonesia telah menyatakan hal tersebut sejak 20 tahun silam, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Hal ini disampaikan oleh Jubir Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, sebagai reaksi dari pidato kenegaraan

Presiden AS Donald Trump yang menyatakan 128 negara, Indonesia salah satunya, yang mendukung resolusi Palestina sebagai musuh. Nasir juga menegaskan bahwa apapun yang AS sampaikan, mereka sudah mengerti Indonesia, dan jelas mengenai posisi Indonesia selama ini (Ariesta, 2018).

#### **4.2.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam tatanan *Capacity Building***

Amerika Serikat memiliki kemampuan militer yang tinggi dibandingkan negara-negara lain, dan akan sangat menguntungkan bagi Indonesia apabila dapat bekerjasama dalam pelatihan militer dengan AS. Tapi hingga saat ini, pelatihan militer antara Indonesia dan AS hanya sebatas teknis dan taktik saja, belum sampai pada level strategis seperti latihan militer yang digelar Indonesia bersama dengan Malaysia. Nurhasya menanggapi hal ini dengan membandingkan letak geografis Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-AS. “Kita tidak bisa membandingkan dengan kerjasama kita dengan Malaysia, karena kita ada perbatasan laut dengan Malaysia” Imbuhnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa latihan gabungan Indonesia-Malaysia yang dikenal dengan Malindo Dasarsa dilakukan dengan tujuan untuk menghadapi ancaman bersama. Sedangkan Indonesia dan AS sangat jauh dari segi letak geografis sehingga pemerintah merasa bahwa latihan militer selama ini yang digelar kedua negara demokratis itu sudah cukup. “Meskipun belum ada latihan gabungan Indonesia dengan AS tiga matra gitu, tapi latihan bersama, latihan antaa tiga matra itu angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara sangat erat dan sangat banyak itemnya”. Lanjutnya (Nurhasya, wawancara personal, 2017).

Alasan lain mengapa latihan militer gabungan Indonesia dan AS belum sampai sejauh latihan dengan Malaysia tersebut adalah untuk menunjukkan ke negara-negara di dunia bahwa Indonesia tidak memihak pada negara manapun. Jadi, hal ini merupakan pengimplementasian politik bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia. Karena apabila

Indonesia mengadakan latihan militer sampai pada level strategis dengan AS, dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan di negara lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Yudi Yulistyanto, kasubdit bilateral ditkersin ditjen strahan kemhan:

“Karena politik luar negeri kita, kita masih menjaga jarak. Tidak mau dianggap bahwa kita terlalu dekat sampai level seperti itu. Apalagi sampai level strategis, kita mengkhianati politik bebas aktif, karena orang2 akan melihat, oh sekarang Indo temennya amerika nih. Kalo Malaysia, tidak ada, ndak papa karena kita kan punya perbatasan, kita bisa ngelesnya ini kan dalam rangka menjaga perbatasan. Trus kita tidak membuat koalisi kaya Nato. Tapi kalo dengan amerika, bayangkan apa reaksi Cina kira-kira, apa reaksi Soviet. Langsung disorot. Itu yang kita tidak mau menaikkan. Kecuali kalo kita diajak amerika kaya RIMPAC (*Rim of the Pasific*) itu kan rame-rame, apa RIMPAC itu latihan angkatan laut yang di Hawaii, tapi dia ngundang dari Thailand, jadi *multi-operation role*.” (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Pada kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia ke AS, Dubes Robert Blake mengatakan bahwa Indonesia dan AS memiliki kerjasama pelatihan militer yang jauh lebih besar jika dibanding kan dengan negara Asia manapun (Nugraha, 2015). Hal yang sama diutarakan oleh Menhan RI, Ia mengapresiasi hubungan bilateral yang terjalin selama ini baik pada bidang pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan melalui pertukaran siswa kedua Negara untuk mengikuti berbagai macam pendidikan. Hingga tahun 2016 lalu sudah tercatat 6.077 prajurit TNI/PNS mengikuti pendidikan di Amerika Serikat, sedangkan prajurit Amerika Serikat yang melaksanakan pendidikan di Indonesia sebanyak 142 orang (Kemhan, 2017).

Politik bebas aktif tetap dijaga oleh Indonesia dalam melakukan kerjasama pertahanan. Banyak kerjasama yang mulai dilakukan kembali dengan AS seperti bantuan *peace keeping operation*, pelatihan bersama, pengadaan alutsista. AS ingin menjaga pengaruhnya di kawasan tetap ada, “Bahkan apabila Indonesia mengizinkan AS ingin bergabung dalam operasi bersama. Mereka ingin dilibatkan dalam operasi militer. Akan tetapi Indonesia berjanji untuk tidak memihak pada blok manapun. Hal ini juga yg selalu ditekankan oleh Kemlu bahwa kita punya kerjasama bagus

dengan Rusia, Cina. Sehingga hubungan baik harus terus dijaga” (Prayogo, wawancara personal, 2017).

Kerjasama pertahanan Indonesia dan AS dalam bidang pendidikan telah dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini, dan setiap tahunnya jumlah personil yang dikirim cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat ada 86 personil yang dikirim, kemudian jumlah bertambah pada tahun 2013 menjadi 101 personil. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah personil menjadi 125 personil. Pada tahun 2015 personil yang mengikuti pendidikan di AS juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 150. Akan tetapi tahun berikutnya jumlah personil mengalami penurunan menjadi 145 dan diikuti pada tahun 2017 lalu personil berkurang menjadi 132 siswa. Tercatat sampai dengan tahun 2016 terdapat 6.077 personil mengikuti pendidikan di AS, sedangkan 142 personil dari AS melaksanakan pendidikan di Indonesia.

AS memang mitra utama Indonesia dalam hal kerjasama pertahanan, selama ini banyak pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh kedua negara. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan *Civil-Military Approaches to Maritime Security Course* di *Center for Civil-Military Relations (CCMR)*, *Naval Post-Graduate School (NPS)*, Amerika Serikat. Ini merupakan bentuk pelatihan yang ditujukan untuk negara negara di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika Serikat. Forum ini sebagai bentuk bertukar pemikiran, terkait situasi keamanan maritim dan mengatasi masalah isu isu yang terjadi. Setelah itu memberikan saran kepada pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun yang sama, kegiatan *Defence Management Program* dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut kesepakatan yang telah dicapai pada kegiatan IUSSD 2016. Adapun kegiatannya terdiri dari; *Executive Seminar* untuk *Senior Leaders*, UNHAN 2017, *Basic Capability Planner's Course*, *Strategic Assessment and Defence Planning Scenarios*. Di tahun sebelumnya, *Multilateral Workshop* dilaksanakan di Honolulu, Hawaii. *Workshop* ini membahas

mengenai *Security Sector Development in The Indian Ocean Region: National Priorities and Regional Approaches*.

Selain itu, CBM juga ditunjukkan dengan kepercayaan mereka dalam menjual alutsista ke Indonesia. Memang masih banyak pembatasan yang diberikan oleh pihak AS, hal tersebut wajar karena AS ingin memastikan bahwa teknologi mereka tidak akan bocor ke pihak lawan.

“Sebenarnya peningkatan agar kita semakin dipercaya sebagai pihak yang menerima alutsista mereka dapat dikatakan cukup baik. Karena pada intinya, Amerika Serikat seperti ini mengenai alutsista, mereka ingin memastikan keterdepanan mereka dalam bidang alutsista agar misalnya teknologi terbaru mereka tidak bocor ke pihak lawan.” (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

Mengenai perkembangan industri pertahanan Indonesia, khususnya dalam proses transfer teknologi, belum merupakan ranah kerjasama bagi dua negara. Karena bagi AS, seperti yang disebutkan dalam IUSSD tahun 2013, hal tersebut belum bisa dilakukan (Kemhan, 2017). Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Kasubdit Bilateral Ditkersin Dirjen Strahan Kemhan, Yudhi Yulistyanto, bahwa AS belum bisa melakukan transfer teknologi dalam penjualan alutsista ke Indonesia, karena dalam pengadaan barang tersebut lebih kepada *business to business* dimana dari pihak AS bukan pemerintah langsung yang mengatur pengadaan alutsista tersebut, melainkan perusahaan swasta penghasil alutsista yang terkait. Selain kendala dari pihak AS, pihak Indonesia pun masih belum mampu untuk melakukan *transfer of teknologi* dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kita miliki. (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Pada tahun 2015, dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden AS, Isu penjualan senjata turut dibahas. Mengenai transfer teknologi, Dubes Blake mengatakan bahwa negaranya siap mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi semua itu tergantung pada negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan AS. “Itu tergantung dari negosiasi, pembangunan jet tempur membutuhkan banyak hal (bisa dihilangkan). (Alih teknologi) itu mungkin di masa depan. Tetapi bukan dalam negosiasi

terkait kunjungan kenegaraan Jokowi AS kali ini” Jelasnya (Nugraha, 2015).

Hingga saat ini, *transfer of technology* yang diberikan AS dalam pengadaan alutsista dengan Indonesia hanya sebatas operasional dan perawatan saja. Pada bidang pengadaan alutsista ada beberapa program yang sedang berjalan, antara lain pembelian 24 unit pesawat F-16. Hingga saat ini Indonesia sudah menerima 22 unit pesawat, sisanya 2 unit pesawat seharusnya tiba pada 12 Desember 2017 lalu bersama 4 pesawat lainnya. Akan tetapi, 2 pesawat tersebut mengalami kerusakan mesin saat mendarat di Hawaii, sehingga harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu (Al-awali, 2017). Selain itu pada tahun 2013, Indonesia menandatangani kontrak dengan AS mengenai helikopter Apache AH64E, yang akan diterima secara bertahap mulai akhir 2017 hingga awal 2018. Dan juga terdapat pembelian 95 unit Tank M113 A1-BE, keseluruhan unitnya sudah diterima dan didistribusikan ke satuan pengguna. (Kementarian Pertahanan, 2017)

Mengenai pembelian alutsista dengan AS, Indonesia masih belum dapat mendapatkan perjanjian untuk transfer teknologi, hal tersebut ditentukan oleh produsen terkait apa saja barang atau fitur yang termasuk dalam penjualan. Terlebih untuk AS sendiri, penjualan alutsista tidak melibatkan pemerintah secara langsung, tapi lebih melalui *business to business*. Hal inipun dibenarkan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri bidang politik keamanan AS, Muhammad Jaki Nurhasya:

“Perlu diingat bahwa kalo untuk alutsista itu adalah *sellers market* bukan *buyers market*, jadi bukan tergantung kita yang beli, tapi gimana yang mau ngejual kan, ngitungnya seperti itu. Maskudnya begini, kita gak bisa beli alat2 senjata seenaknya, itu kan tergantung juga gimana mereka mau ngelepas senjatanya apa ke kita. Klo di Amerika Serikat ya tau sendiri kan ya banyak undang-undang yang apa namanya instrument-instrument *policy* yang apa ya yang bisa merintangai pembelian senjata atau kerjasama pertahanan kedua negara, kan disebutkan pula ada Leahy Law disitu kan. Itu masih berlaku.” (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

Hal ini juga dibenarkan oleh Yulistyanto, “Mengenai *transfer of technology*, AS mengatakan walaupun itu perusahaan industri

pertahanan, itu murni perusahaan swasta, yang pemerintah tidak bisa dengan seenaknya (meminta mereka untuk melakukan ToT)". Indonesia dalam hal ini sudah meminta AS untuk melakukan ToT, akan tetapi pemerintah AS selalu mengatakan bahwa itu merupakan wewenang perusahaan swasta, sehingga ToT yang kita dapatkan selama ini masih sebatas perawatan dan penggunaan saja.

"Mengenai kerjasama pertahanan ke depan, penggunaan alutsista AS masih tetap ada dan akan terus berlanjut karena *spareparts* nya kita butuhkan. Tapi di sisi lain hal ini juga dilakukan Indonesia dengan negara yang berbeda. Jadi kita menjalin hubungan juga dengan Rusia, dengan Cina, ataupun Eropa, karena supaya tidak bergantung dengan satu negara saja. Tapi juga kita kembali pada masa lalu ketika ada embargo *spareparts* F-16, masalah Timor. Kita belajar dari itu, kita tidak mau terlalu terikat kepada Amerika Serikat." (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Jadi, pembelian alutsista Indonesia tergantung kepada kebutuhan militer Indonesia saat itu, sehingga apabila memang memerlukan jenis alutsista yang diproduksi oleh AS, maka pembelian atau pengadaan akan tetap dilakukan. Kemudian, saat ditanyakan apakah dalam perjanjian atau kontrak dalam pengadaan alutsista ada pernyataan untuk tidak memberikan embargo, minimal untuk alutsista yang kedua negara sedang sepakati. Hal demikian dikatakan tidak ada karena untuk penjatuhan embargo itu keputusan politik, sehingga ketika terjadi sesuatu di antara kedua negara di masa depan, sah-sah saja apabila AS merasa butuh menambahkan ketentuan baru.

"Itu (kesepakatan untuk tidak meng-embargo) tidak bisa. Jadi, tidak ada klausul. Memang pembelian alutsista tertentu, negara yang jadi satu grup di dalam kerjasama ataupun blok keamanan tertentu itu dipermudah. Jadi, kalo dia anggota NATO misalnya, pembelian di antara mereka lebih gampang. Tapi kalo misalnya kita mau membeli satu teknologi atau alutsista tertentu – kita bukan anggota NATO – belum tentu gampang, segampang kalo kita *member*. Masalahnya kan kita tidak tergabung dalam anggota NATO. Tapi mungkin kita dianggap sebagai mitra Barat. Jadi mungkin kalo dijual ke kita, Barat bisa. Misal prasyarat-prasyarat penjualan itu tidak boleh transfer teknologi tertentu kepada pihak ketiga, hak cipta, dan hal-hal lain. Itu persyaratannya mereka yang menentukan. Jadi tidak bisa kita mengatakan, kalo kita beli ga boleh di embargo yah. Gabisa juga gitu. Tapi itu kan politik biasanya. Misal terjadi apa-apa kedepan, dia

mau menambahkan ketentuan yang baru, sah-sah saja.” (Hutabarat, wawancara personal, 2017)

Dengan penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Indonesia dan AS memiliki kerjasama di banyak lini, mengenai evaluasi akan kerjasama-kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan AS baik pendidikan ataupun pelatihan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan khususnya di Ditkersin dengan melibatkan *stakeholder* yang terlibat atau dapat dilakukan saat *annual forum* yang dilakukan oleh kedua negara, seperti *annual meeting* di bidang pendidikan misalnya. Dalam pertemuan tahunan itu juga membahas pendidikan apa yang ditawarkan oleh AS, lalu Indonesia mau menerima atau tidak, semua dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Yang mengevaluasi Ditkersin ini. Hanya kembali dengan, bukan kita menghindari, tapi dengan beban kerja yang sedemikian besar disini, dan juga stakeholder yang berkaitan dengan itu juga cukup banyak, kadang-kadang evaluasi itu terlewatkan. Kita mengevaluasinya nanti, ketika ada mekanisme lain, seperti kalo di bidang pendidikan dia punya *annual meeting* di bidang pendidikan.” (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Selanjutnya, mengenai bentuk kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara yaitu *Joint Statement on Defense Cooperation* yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara dinilai sudah cukup oleh beberapa pemangku kebijakan. “Saat ini belum ada pengusahaan dengan untuk DCA, jadi memang perujukan kita selalu ke 2015 ke *Joint Statement on Defense Cooperation*” (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

Mengenai payung hukum kerjasama antara Indonesia dan AS belum mencapai *defense cooperation agreement*, tapi masih pada level *joint statement on strategic partnership*. Hal ini dijelaskan Yudi Yulistyanto bahwa AS paling tidak mau membuat payung hukum yang terlalu umum, terbuka, biasanya hanya menyentuh satu bagian tertentu.

“Kita punya mekanisme IUSSD, itulah media untuk menyusun bentuk-bentuk kerjasama lain yang akan kita lakukan di setiap periode

berikutnya”. Forum dialog bilateral ini melibatkan banyak pihak tergantung dengan topik pembahasan mengenai kerjasama apa yang akan dilakukan. Misalnya dalam pertemuan tersebut kedua negara akan bekerjasama dalam bidang industri pertahanan, Indonesia akan mengundang teknik industri dengan pabrikannya, seperti PT. PAL, PT. Pindad, PT. Inti. “Kalau masalah research ya berarti kita melibatkan BANLITBANG. Pendidikan nanti kita libatkan TNI, macam pendidikannya apa.” Jelasnya. (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Terkait dengan kerjasama Indonesia-AS yang telah terjalin selama ini, masih ada beberapa hal yang diperlukan Indonesia dalam hal meningkatkan kemampuan militernya atau untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu dalam hal pengiriman PKO dan juga dalam hal *transfer of technology*. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan peningkatan industri pertahanan dalam negeri, ditunjukkan dengan diterbitkannya UU Industri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012 yang berisi bahwa setiap pengadaan atau pembelian alutsista harus melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Sehingga, Indonesia mengupayakan untuk terjadinya *transfer of technology* dalam setiap pengadaan alutsista. Akan tetapi hal tersebut belum dapat terwujud karena banyak dan lain hal yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini diutarakan baik oleh pihak Kemlu maupun pihak Kemhan:

“Ya tentu yang kita inginkan adalah teknologi pertahanan mereka, apabila dapat terjadi ToT dari AS dengan tidak mengikatkan Indonesia ke AS secara khusus, secara eksklusif”. (Nurhasya, wawancara personal, 2017) Hal senada dikatakan oleh Yulistyanto, “Tentunya yang paling utama adalah alutsista. Tapi kembali ke keterbatasan pendanaan yang kita miliki.” Karena hingga saat ini, anggaran militer Indonesia masih sangat terbatas. Selain pendanaan, sumber daya manusia khususnya TNI disini juga masih kurang, sistem yang Indonesia miliki juga belum menunjang. “Jadi kendalanya itu antara kesiapan kita, sistem, dan kalau dari pihak amerika yang selalu dia ngeles karena itu pemerintah tidak bisa

mengatur (perusahaan swasta mereka).” (Yulistyanto, wawancara personal, 2017)

Hal lain yang dibutuhkan Indonesia dalam peningkatan kemampuan militernya adalah dukungan terhadap misi PMPP, pengiriman pasukan PKO Indonesia oleh PBB. Dan hal ini sedang diupayakan oleh kedua belah pihak.

“(Yang dibutuhkan Indonesia dari AS) dukungan terhadap misi PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian), misi pasukan perdamaian kita di PBB misalnya. PKO kita akan ditingkatkan menjadi 400 ribu personel. Dan kita sedang biding untuk menjadi *permanent member of US security council*. Kita juga akan meningkatkan peran Indonesia dalam pasukan misi perdamaian PBB”. (Nurhasya, wawancara personal, 2017)

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam tatanan *Confidence Building Measures (CBM)***

Pada bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – AS. Pada kenyataannya, kegiatan atau aktivitas diplomasi pertahanan telah dilakukan sejak lama, akan tetapi, dahulu diplomasi dan pertahanan tidak dapat digabungkan dalam satu frasa, karena diplomasi identik dengan cara damai sedangkan pertahanan identik dengan militer atau penggunaan kekuatan. Diplomasi pertahanan lebih ditujukan pada upaya memperkuat kapabilitas pertahanan negara sekutu daripada sebagai sebuah instrumen untuk membangun hubungan kerjasama dengan pihak lawan guna membantu mencegah potensi konflik yang ada (Cottey dan Forster, 2004). Akan tetapi, terminologi diplomasi pertahanan kini didefinisikan sebagai semua metode dan strategi yang digunakan oleh negara yang mungkin sedang berkompetensi dengan negara lain, tetapi mereka telah menggunakan jenis praktik tertentu termasuk ekonomi, budaya, kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan diplomasi untuk berteman, dengan harapan untuk bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting untuk membangun dan meningkatkan

rasa saling percaya (Pedrason, 2015, hal. 15). Sehingga, dengan perkembangannya, dapat dikatakan bahwa diplomasi pertahanan tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan aspek lain seperti ekonomi, budaya, kerjasama politik untuk membangun kerjasama dan meningkatkan rasa saling percaya.

Sub bab ini menjabarkan aktifitas diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Amerika Serikat pada periode 2012 hingga 2017 dalam tatanan *confidence building measures* yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya antara kedua negara. Menurut Acharya (2011, hal. 8) sasaran utama dari terbentuknya CBM adalah untuk mengurangi ketidakpastian strategis. Acharya juga menjelaskan bahwa CBM memiliki serangkaian tujuan, antara lain yaitu (a) mengurangi ketegangan dan kecurigaan, (b) mengurangi resiko perang secara tidak sengaja atau yang disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan, (c) membina komunikasi dan kerjasama dengan cara yang membantu dalam pencegahan penggunaan kekuatan militer, (d) membawa pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan satu sama lain, dan (e) mengembangkan rasa kepercayaan strategis yang lebih besar di kawasan.

Dengan kata lain, CBM dilakukan untuk membangun hubungan baik antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan utamanya dilakukan untuk menghilangkan mispersepsi antar negara atau menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan atau kapabilitas militer, agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lain (Multazam, 2010, hal. 45). Sehingga, dalam sebuah hubungan CBM atau juga yang dikenal dengan *mutual trust* sangatlah dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman atau kecurigaan yang timbul akibat satu aktivitas atau keputusan tertentu. Karena kecurigaan dan kecemasan yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan membawa hubungan yang baik dan stabil dengan negara lainnya. Begitu pula dalam kerjasama pertahanan antara Indonesia dan AS, CBM

diperlukan agar tidak ada lagi kecurigaan yang akan berdampak buruk bagi hubungan kerjasama keduanya. Beberapa upaya diplomasi telah dilakukan oleh kedua negara demokratis tersebut dalam upaya untuk membangun CBM yang baik.

Bila melihat kembali beberapa tahun ke belakang, sesungguhnya hubungan Indonesia dan AS khususnya dalam kerjasama pertahanan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dilihat dari terbukanya kembali jalur kerjasama pertahanan antara kedua negara setelah beberapa dekade AS menjatuhkan sanksi embargo terhadap Indonesia. Pembukaan kerjasama pertahanan kedua negara demokrasi ini dilakukan secara bertahap, dan menunjukkan kemajuan yang baik pada saat disepakatinya *Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defence of the United States of America* pada tahun 2015 lalu (Kemhan, 2017). Akan tetapi, hingga saat ini dapat dilihat bahwa AS belum sepenuhnya percaya dengan kemajuan profesionalisme TNI dengan masih diberlakukannya *Human Rights Vetting* atau yang dikenal juga dengan *Leahy Law*. Kebijakan ini menunjukkan bahwa masih belum terbangunnya rasa percaya AS terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sehingga, diindikasikan bahwa CBM yang terbangun oleh kedua negara masih belum tinggi, karena masih terdapat pembatasan dalam hubungan keduanya. Selanjutnya, dalam menganalisa pelaksanaan CBM kedua negara, peneliti menggunakan indikator yang dideskripsikan oleh Baviera (2001, hal. 4), yaitu *communication, transparency, consultation, goodwill, economic CBM, socio cultural CBM, dan Political CBM*.

#### **4.3.1.1. Communication**

Pertama adalah *communication*. Baviera (2001) menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pelaksanaan CBM adalah adanya forum komunikasi yang terjadi dalam hubungan bilateral, dan hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya reguler bilateral dialogue antara keduanya. Dalam diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dan AS ada

beberapa forum dialog yang terbentuk antara lain adalah *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) dan *United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion* (USIBDD) (Kementerian Pertahanan, 2017). Dialog IUSSD dibentuk pada 19 September 2001 oleh Presiden Indonesia dan Presiden AS. IUSSD ini merupakan kegiatan bilateral tahunan yang dikoordinasikan oleh Kemhan dan dipimpin oleh pejabat setingkat Dirjen dan merupakan sebuah forum bagi Indonesia dan AS untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai isu-isu keamanan global, regional, dan nasional yang menjadi perhatian bersama (Kementerian Luar Negeri, 2005).

Forum dialog IUSSD ini merupakan forum komunikasi andalan bagi kedua negara karena forum ini mewadahi kedua negara untuk mengekspresikan pandangan dan menumbuhkan ide-ide baru dalam mengatasi tantangan keamanan dan untuk lebih memperkuat kerjasama pertahanan bilateral. Seperti yang terlihat pada topik pembahasan dalam IUSSD lima tahun terakhir yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, kedua negara saling mengapresiasi kemajuan negara dalam hal demokrasi, hukum, maupun pembangunan yang telah tercapai. Selain itu, forum ini juga mewadahi kerjasama pertahanan keduanya, dimana kedua negara membahas mengenai kerjasama pertahanan baik hal-hal yang perlu dievaluasi maupun hal-hal yang dapat lebih ditingkatkan, seperti kerjasama pendidikan, latihan, atau bantuan militer. Hal ini juga diungkapkan oleh Kasubdit Bilateral, Yudi Yulistyanto, yang mengatakan bahwa IUSSD merupakan media untuk menyusun bentuk-bentuk kerjasama lain yang akan Indonesia dan AS lakukan di setiap periode berikutnya (Yulistyanto, wawancara personal, 2017).

Lebih jauh lagi, forum IUSSD ini merupakan peran kunci bukan hanya dalam meningkatkan hubungan sipil-militer, memperkuat stabilitas kawasan, akan tetapi juga dalam membangun CBM kedua negara (Kementerian Luar Negeri, 2005). Hal serupa juga dikatakan oleh Nurhasya (2017) bahwa peningkatan CBM Indonesia dan AS cenderung mengalami peningkatan karena mekanismenya juga semakin terstruktur.

Nurhasya melanjutkan bahwa dalam bidang pertahanan Indonesia dan AS memiliki forum IUSSD dan USIBDD yang juga membawahi kerjasama lainnya, yaitu bidang maritim, keamanan, maupun *defense technology*.

Melihat pada pertemuan IUSSD yang dilaksanakan lima tahun terakhir, tidak ada pembahasan secara khusus mengenai masalah *human rights vetting* yang diberlakukan oleh AS. Pembahasan lebih kepada Indonesia terus menunjukkan upaya dalam meningkatkan profesionalitas TNI untuk meningkatkan pemahaman HAM di kalangan militer Indonesia kepada pihak AS (Nurhasya, wawancara personal, 2017). Ini juga merupakan upaya Indonesia dalam membangun CBM tersebut. Dan pemerintah AS sendiri sudah melihat perkembangan tersebut, ditunjukkan dengan kunjungan pejabat pemerintahan AS ke Indonesia dan apresiasi yang mereka ungkapkan akan kemajuan demokrasi di Indonesia. Bentuk kepercayaan AS itu sendiri dapat dilihat dari sudah banyaknya pendidikan dan pelatihan militer yang dilakukan kedua negara, dan juga kepercayaan AS untuk menjual alutsista mereka ke Indonesia. Akan tetapi Leahy Law tersebut bukan merupakan produk dari pemerintah AS, melainkan amandemen tersebut dikeluarkan oleh Kongres AS, dan terkadang apa yang diinginkan oleh Pemerintah eksekutif AS bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kongres AS (Nurhasya, wawancara personal, 2017). Sehingga, dalam mengatasi *human right vetting* ini dibutuhkan komunikasi atau pendekatan yang bukan hanya kepada Pemerintah AS tapi juga ke Kongres AS.

Selain IUSSD, Indonesia dan AS memiliki forum dialog bilateral pada tahap operasional yang dikoordinasikan oleh Mabes TNI yaitu *United States-Indonesia Bilateral Defense Discussion* (USIBDD). Dalam forum ini, Panglima TNI sebagai Ketua Delegasi dan *Co-Host*, dan Dirjen Strahan Kemhan sebagai anggota delegasi. Kemudian dari pihak AS adalah Komandan USPACOM (Kementerian Pertahanan, 2017). Forum dialog pada tahap operasional ini merupakan hasil dari pertemuan IUSSD yang kedua yang berlangsung pada 22-23 April 2004 di Washington DC (Puspen TNI, 2006). Forum USIBDD ini merupakan salah satu forum dialog

bilateral yang dilakukan antara militer Indonesia dengan militer AS yang terorganisir dan terukur. Sama seperti IUSSD, forum ini dilaksanakan setahun sekali secara bergantian bertempat di AS dan Indonesia, forum ini juga mendukung upaya Indonesia dan AS dalam meningkatkan kerjasama pertahanan diantara keduanya.

Forum USIBDD ini meliputi dialog strategis dan kerjasama tingkat operasional hingga pada tahap merencanakan dan melaksanakan pelatihan, latihan, dan kegiatan pertukaran materi yang berkaitan. Berbeda dengan IUSSD, USIBDD ini memiliki empat kelompok kerja, antara lain Kelompok Kerja Latihan (Training Event Working Group/TEWG), Kelompok Kerja Intelijen dan Komunikasi (Intelligence and Communication Working Group/ICWG), Kelompok Kerja Logistik (Logistic Working Group/Log WG ) dan Kelompok Kerja Pendidikan dan Program Spesifik (Educational and Specific Working Group/ESPWG) (Puspen TNI, 2006). Salah satu bentuk realisasi dari forum ini adalah Latihan bersama (Latma) *Pacific Partnership* 2016 yang dilakukan oleh kedua negara antara Puskes TNI dengan *United States Pacific Fleet US Navy* yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2016 di Markas Komando (Mako) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II Padang. Kegiatan ini menitikberatkan pada latihan kesehatan militer dalam penanggulangan bencana yang sebelumnya pernah dilaksanakan di Maluku pada tahun 2010, Sulawesi Utara pada tahun 2012, dan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 (Dispenal Mabesal, 2016).

Kedua forum dialog ini dilakukan secara rutin setahun sekali dengan lokasi pertemuan secara bergantian di AS dan Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan AS memiliki mekanisme terstruktur dalam membangun komunikasi di antara keduanya. Dengan terbentuknya forum dialog bilateral tahunan tersebut menunjukkan adanya proses komunikasi sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan CBM antara Indonesia dan AS. Sejalan dengan hal tersebut, Yudi Yulistyanto, Kasubdit Bilateral Kemhan, menjelaskan bahwa CBM Indonesia dan AS sudah terbangun ditunjukkan dengan mekanisme bakunya yang sudah

cukup bagus (Yulistyanto, wawancara personal, 2017). Nurhasya menambahkan bahwa CBM Indonesia dan AS telah mengalami peningkatan, dari sebelumnya terjadi kasus embargo AS terhadap Indonesia. Ia menambahkan bahwa mekanisme diplomasi pertahanan antara Indonesia dan AS sudah terbangun, dan dinamika hubungan tidak menunjukkan naik turun yang berarti. Begitu pula dengan naiknya Trump sebagai Presiden AS, hal tersebut juga tidak membuat hubungan kedua negara menurun, melainkan hanya persepsi rakyat saja yang sangat naik turun (Nurhasya, wawancara personal, 2017).

#### **4.3.1.2. *Transparency***

Transparansi juga merupakan peran kunci dalam membangun CBM suatu negara dengan yang lainnya. Keterbukaan dalam suatu hubungan bernegara diperlukan untuk mengurangi mispersepsi yang mungkin terjadi di antara pihak yang terlibat. Acharya (2011) menjelaskan transparansi sebagai pembukaan akses informasi mengenai postur, kemampuan dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait lainnya dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara negara yang bersangkutan. Apabila melihat kembali kepada kejadian tahun 2005 saat pencabutan embargo AS atas Indonesia dilakukan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Richard Boucher, menegaskan bahwa pencabutan embargo sepenuhnya bergantung pada kerjasama penanganan terorisme, penanganan hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran HAM, dan juga akuntabilitas dan transparansi keuangan militer Indonesia (Shoelhi, 2009, hal. 241-242). Dapat dilihat bahwa AS menginginkan adanya sikap transparansi dari pihak Indonesia.

Aktivitas transparansi dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan AS ditunjukkan dengan adanya publikasi Buku Putih Pertahanan (Acharya, 2011, hal. 9). Salah satu upaya transparansi mengenai Buku Putih Pertahanan Indonesia ini dapat dilihat pada pertemuan IUSSD ke-12 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2014 di Washington

DC. Pada kesempatan itu, delegasi Indonesia membahas mengenai perkembangan Buku Putih Pertahanan RI tahun 2014 dimana delegasi Indonesia menyampaikan secara garis besar mengenai susunan buku tersebut. Dan Indonesia juga menyampaikan bahwa Buku Putih 2014 yang telah disetujui oleh pemerintahan sebelumnya akan dilakukan revisi pada tahun 2015 (Kementerian Pertahanan RI, 2017).

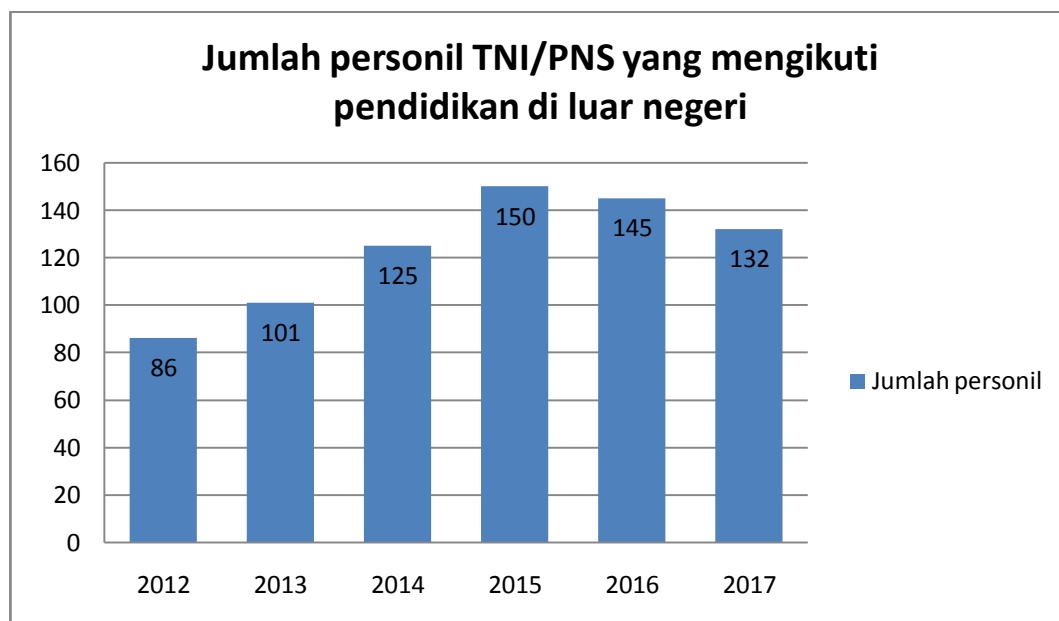
Selain publikasi Buku Putih Pertahanan, aktivitas transparansi yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menginfokan kepada pemerintah AS mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam negeri baik dari perubahan arah tujuan pemerintahan ataupun kemajuan sistem keamanan yang terbentuk. Pada saat diangkatnya Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 lalu, melalui forum dialog bilateral IUSSD, Pemerintah Indonesia memberikan informasi mengenai tujuan Kemhan RI pada pemerintahan baru yaitu tetap berfokus pada pengembangan personel, modernisasi alutsista, pengembangan infrastruktur dan pengembangan organisasi dan manajemen. Sama halnya Indonesia menyampaikan isu keamanan maritim dengan mengangkat isu terbentuknya Bakamla secara resmi untuk melakukan penindakan di Laut (Kementerian Pertahanan RI, 2017).

Baviera (2001) menjelaskan bahwa aktivitas transparansi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta pertukaran intelijen. Kerjasama pertahanan Indonesia dan AS dalam bidang pendidikan telah dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini, dan setiap tahunnya jumlah personil yang dikirim cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat ada 86 personil yang dikirim, kemudian jumlah bertambah pada tahun 2013 menjadi 101 personil. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah personil menjadi 125 personil. Pada tahun 2015 personil yang mengikuti pendidikan di AS juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 150. Akan tetapi tahun berikutnya jumlah personil mengalami penurunan menjadi 145 dan diikuti pada tahun 2017 lalu personil berkurang menjadi 132 siswa. Tercatat sampai dengan tahun 2016 terdapat 6.077 personil mengikuti pendidikan

di AS, sedangkan 142 personil dari AS melaksanakan pendidikan di Indonesia.

Berikut rekapitulasi siswa TNI/PNS sesuai SKEP Kemhan/Panglima TNI yang mengikuti pendidikan luar negeri tahun 2012-2017:

**Gambar 4.1 Rekapitulasi Siswa TNI/PNS yang Mengikuti Pendidikan Luar Negeri tahun 2012-2017**



Sumber: Kermadikmat Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan

Pada bidang pelatihan, pada tahun 2017, telah dilaksanakan *Civil-Military Approaches to Maritime Security Course* di *Center for Civil-Military Relations (CCMR)*, *Naval Post-Graduate School (NPS)*, Amerika Serikat. Pelatihan ini merupakan bentuk bertukar pemikiran terkait isu atau situasi keamanan maritim dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Kemudian setelahnya memberikan saran kepada pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, diadakan pula kegiatan *Defense Management Program* antara Indonesia dan AS sebagai perwujudan dari kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan IUSSD tahun 2016. Kegiatan yang berlangsung dalam program ini meliputi *Executive Seminar* untuk *Senior Leaders*, UNHAN 2017, *Basic capability Planner'd Course*, *Strategic Assessment*

*and Defense Planning Scenarios*. Bentuk pelatihan lain yang dilakukan adalah Multilateral Workshop mengenai Security Sector Development in The Indian Ocean Region: National Priorities and Regional Approaches. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2016 dan bertempat di Honolulu, Hawaii.

Publikasi Buku Putih Pertahanan, pengiriman militer untuk mendapatkan pendidikan di AS, pelatihan militer yang diselenggarakan kedua negara merupakan kegiatan yang menunjukkan adanya aktivitas transparansi antara Indonesia dan AS. Aktivitas-aktivitas tersebut mendefinisikan adanya pembagian informasi mengenai postur, kemampuan, dan kebijakan nasional negara di bidang militer sehingga dapat mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara Indonesia dan AS. Dengan dilaksanakannya aktivitas transparansi tersebut memberikan kontribusi dalam memelihara atau meningkatkan CBM kedua negara. Seperti yang ditegaskan oleh Jaki Nurhasya bahwa dalam meningkatkan CBM antara Indonesia dan AS, selain melalui forum IUSDD dan USIBDD, peningkatan CBM juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Nurhasya, 2017). Hal ini ditambahkan oleh Yudi Yulistyanto bahwa pendidikan diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Yulistyanto bahwa pendidikan itu untuk meningkatkan kapasitas berpikir, ketika kapasitas berpikir meningkat maka secara linear kapasitas diri juga pasti akan meningkat. Ia melanjutkan bahwa selain itu, Indonesia dan AS memiliki *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dimana dengan perjanjian ini, kedua negara dapat melakukan kerjasama pertahanan di berbagai lini baik pendidikan, *procurement*, maupun industri pertahanan (Yulistyanto, wawancara personal, 2017).

#### **4.3.1.3. Consultation**

Indikator selanjutnya adalah *consultation* yang juga memiliki peran dalam membangun rasa saling percaya dalam satu hubungan negara dengan negara yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan Baviera

(2001) bahwa bentuk dari aktivitas konsultasi dalam pelaksanaan CBM pada hubungan bilateral negara ditunjukkan melalui *Joint Commision*. Dalam hubungan bilateral Indonesia dan AS, forum konsultasi yang dibentuk kedua negara ini adalah *Joint Commission Meeting (JCM)* yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri AS dan diselenggarakan setiap tahun. JCM ini dibentuk pada 17 September 2010.

Forum JCM ini dilakukan kedua negara untuk memperkuat kemitraan komprehensif bilateral antara Indonesia dan AS dan untuk meningkatkan kontribusi kedua negara terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. Dalam JCM ini Menlu sebagai ketua delegasi yang membawahi beberapa *working groups*. *Working groups* dalam JCM ini terdiri antara lain *Working Group on Democracy and Civil society, Security, Trade and Investment, Energy, Education, Climate and Environment* (stategov, 2009-2017). Masing-masing *working groups* ini dipimpin oleh Co-Host yang selanjutnya akan melaporkan hasil diskusi dalam grupnya kepada ketua delegasi.

#### **4.3.1.4. Goodwill**

Indikator keempat dalam meningkatkan *mutual trust* antar negara dengan diadakannya *visit* (Baviera, 2001, hal. 4). Dalam hubungan Indonesia dan AS *goodwill* atau itikad baik yang ditunjukkan kedua negara ini dilakukan dengan kunjungan kenegaraan. Pemerintah Indonesia dan AS juga kerap kali melakukan kunjungan kenegaraan untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk menyepakati suatu keputusan bersama. Duta besar untuk isu perempuan global, Catherine Russell, berkunjung ke Bali, pada tanggal 5-9 September 2013 untuk berpartisipasi dalam *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Women and the Economy Forum (WEF)*. Kemudian pada 12 September tahun yang sama, asisten sekretaris negara untuk hubungan Asia Timur dan pasifik, Daniel Russel, melakukan kunjungan bilateral di Indonesia. untuk berdiskusi dengan pejabat senior pemerintahan Indonesia mengenai berbagai masalah

bilateral dan regional. Disusul oleh Sekretaris negara, John Kerry, berkunjung ke Bali, Indonesia pada 4 Oktober 2013 untuk menghadiri *Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting (AMM)*, dan pertemuan terkait APEC lainnya. Apec adalah sebuah forum yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Mempromosikan perdagangan dan investasi di Asia Pasifik tetap menjadi komponen kunci dari kebijakan rebalance A.S. Sekretaris tersebut berpartisipasi dalam berbagai pertemuan multilateral dan bilateral dengan pejabat dari negara anggota APEC (stategov, 2009-2017).

Kemudian, pada tanggal 13-20 Februari 2014, Sekretaris Negara John Kerry pergi ke Seoul, Beijing, Jakarta, Abu Dhabi, Tunis, dan Paris untuk bertemu dengan pejabat pemerintah senior dan menangani berbagai isu bilateral, regional, dan global. Ini adalah perjalanan kelima ke Asia untuk Sekretaris dalam satu tahun terakhir. Di Jakarta, Sekretaris tersebut mengulangi bahwa Amerika Serikat menghargai kepemimpinan Indonesia yang terus tumbuh dalam tantangan global dan berharap dapat terus bekerja dengan Indonesia mengenai isu-isu termasuk perubahan iklim, keamanan, demokrasi, integrasi regional, dan hak asasi manusia. Dia memimpin bersama dalam Rapat Komisi Bersama di bawah Kemitraan Komprehensif A.S.-Indonesia. Dia juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan kami dengan institusi multilateral Asia saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pada tahun berikutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan ke AS pada 7-15 Mei 2015. Pada kunjungannya kali ini, Menhan akan bertemu dengan sejumlah pihak dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Dalam pertemuannya tersebut, Sejumlah isu akan dibicarakan seperti penanganan isu-isu strategis yang sedang dihadapi bangsa-bangsa di dunia antara lain terorisme, bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi. Dalam pertemuannya dengan Jenderal Brooks di Hawaii, Menhan akan membahas penanganan masalah ISIS.yang tidak hanya mengancam keamanan dan stabilitas

regional di Timur Tengah saja, tetapi juga dapat meluas ke masyarakat sipil dunia (detiknews, 2017).

Menhan Ryamizard kembali mengunjungi AS bersama pada tanggal 26 Oktober 2015 dan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Ash Carter untuk membicarakan hal-hal terkait dengan upaya memperkuat hubungan pertahanan kedua negara termasuk membahas peluang-peluang untuk memperluas kerjasama kedua negara seperti pada bidang perdagangan, teknologi, keamanan maritim, serta keamanan siber. Selain peluang dalam kerjasama bilateral, Menteri Pertahanan kedua negara juga membahas hambatan dalam melaksanakan latihan gabungan serta kelanjutan pengadaan alat pertahanan. Pada akhir pertemuan kedua Menhan menandatangani Pernyataan bersama Mengenai Kerja Sama Komprehensif Bidang Pertahanan (*Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation*). Pernyataan ini meliputi lima pilar: kerjasama maritim, penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana, modernisasi pertahanan serta melawan ancaman transnasional (U.S DoS, 2015).

Dalam rangka memenuhi undangan Presiden Barack Obama, Presiden Joko Widodo berkunjung ke AS pada tanggal 26 Oktober 2015. Dalam kesempatan kali itu kedua Presiden melakukan pertemuan di Gedung Putih dan menyetujui beberapa pernyataan bersama, antara lain mengenai pernyataan bersama tentang comprehensive pada kerjasama pertahanan yang di tandatangi oleh Menhan RI dan Menhan AS. Pada pertemuan ini, Presiden AS dan Presiden RI menyadari bahwa Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia perlu ditingkatkan dan kedua negara perlu senantiasa memperdalam hubungan berdasarkan keuntungan bersama dan rasa saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan ini, kedua Presiden berkomitmen untuk menyusun Kemitraan Strategis antara kedua negara, untuk memperluas kerja sama dalam bidang strategis yang menjadi kepentingan bersama. Keduanya juga menyetujui dibentuknya Dialog Strategis Menteri (*Ministerial Strategic Dialogue*) tahunan, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara,

di samping pertukaran tingkat menteri lainnya, sebagai wadah diskusi dan kolaborasi dalam upaya-upaya strategis untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan internasional, sekaligus prioritas bilateral (U.S DoS, 2015)

Kunjungan kenegaraan kedua negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Ringkasan Kunjungan Kenegaraan Indonesia-AS (2012-2017)**

Tanggal	Kegiatan
05-09 September 2013	Dubes AS berkunjung ke Indonesia
12 September 2013	<i>Secretary Assistant of State</i> US berkunjung ke Indonesia
04 Oktober 2013	Secretary of State of US menghadiri <i>Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting</i> di Bali
13-20 Februari 2014	Secretary of States AS berkunjung ke Indonesia
07-05 Mei 2015	Menhan RI melakukan kunjungan ke AS
26 Oktober 2015	Presiden Joko Widodo dan Menhan RI berkunjung ke AS

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

#### **4.3.1.5. Economic CBM**

*Economic CBM* yang dimaksud disini adalah dalam hal *preferential term of trade* Indonesia dan AS yang dapat mempengaruhi tingkat CBM kedua negara (Baviera, 2001, hal. 4). Pada era Trump, economic CBM Indonesia dan AS kurang terbangun ditunjukkan dengan masuknya Indonesia dalam daftar negara penyebab defisit AS (Harding dan Sutton, 2017, hal. 1-4). Hal ini terjadi karena banyaknya barang Indonesia yang masuk ke AS, sedangkan hal berlawanan terjadi dengan barang AS yang masuk ke Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kebetulan barang yang mereka jual bukan merupakan barang yang kita inginkan, atau barang

yang kita butuhkan tidak dimiliki atau tidak dijual oleh mereka sehingga kita membeli barang tersebut dari negara lain.

Mengenai hal ini Trump akan mencari jalan untuk memperbaiki perekonomian dalam negerinya. Pengamat politik CSIS, Phillips J Vermonte berpendapat bahwa dari segi politik ekonominya, Trump akan membuat kebijakan yang menjadikan biaya barang impor atau barang yang masuk ke AS lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk menumbuhkan industri negara paman sam itu. Dan hal ini perlu diperhatikan oleh Indonesia karena dapat berdampak pada pertahanan negara, melalui bidang ekonomi. Hal ini bisa berdampak pada perekonomian negara apabila Presiden Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal proteksi perekonomian negaranya yang akan menghambat nilai atau jumlah ekspor barang Indonesia (Artanti, 2017).

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Pusat Kajian AMEROP yang mengatakan bahwa Trump akan melakukan tekanan untuk menyeimbangkan perekonomiannya. Dia akan melakukan kenaikan pajak yang tinggi untuk CPO (*Crude Palm Oil*) Indonesia, kemudian ada yang bio-diesel, jadi dia sudah melakukan hambatan-hambatan untuk mengajak bicara untuk mencari penyelesaian bersama (Hutabarat, wawancara personal, 2017).

Usaha dari kedua negara untuk menyelesaikan hal ini sangat diperlukan. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia menyarankan kerjasama ekonomi di sektor lain, investasi menjadi salah satu pilihan. Sehingga, ketika Indonesia banyak jual barang ke AS, AS *invest* lebih banyak, itu akan membuat perekonomian berimbang. Semua upaya kerjasama perekonomian yang dilakukan pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negeri, baik dengan cara investasi ataupun perdagangan. Hal ini pula sempat dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L Marsudi, pada pidato pertamanya (29/10/2014) bahwa RI akan menjalankan kebijakan diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dengan

meningkatkan dan memperluas akses pasar bagi produk Indonesia, baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral (Alhaidar, 2014).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain, seperti Rusia. Dan hingga pertengahan tahun 2017 lalu, perdagangan kedua negara mengalami peningkatan yang cukup baik. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Rusia mencatat surplus USD 77,45 hingga Mei 2017 dengan peningkatan volume perdagangan sebesar 54,43 persen atas USD 1,12 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, mengatakan bahwa kerjasama Indonesia dengan Rusia merupakan peluang yang cukup besar dan harus diambil oleh pemerintah Indonesia, mengingat Rusia tengah menghadapi embargo ekonomi oleh AS dan Eropa. “Betapa pentingnya kerjasama ini di tengah mereka bermasalah dengan AS dan Eropa dan kita datang sebagai kawan” tegasnya (Anggraini, 2017).

#### **4.3.1.6. Socio Cultural CBM**

Indikator selanjutnya adalah *socio cultural CBM's*. Dalam indikator ini hubungan bilateral ditunjukkan dengan adanya *people to people links* dari kedua negara (Baviera, 2011, hal. 4). Citra AS di mata Indonesia merupakan perkembangan yang luar biasa di era Obama dalam hubungan AS dengan negara Muslim. Hal berbeda terjadi pada era Trump yang pemerintahannya penuh gairah Islam (*islamophobic*) yang telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang warga dari tujuh negara Muslim untuk masuk ke AS. Walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam tujuh negara tersebut, kecenderungan Trump yang menyamaratakan Islam di seluruh dunia perlu dikhawatirkan. Akan sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia apabila AS menyamaratakan Islam di Indonesia dengan Islam di Timur Tengah, dengan menganggap sebagai ancaman.

Hal ini dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, karena AS itu memahami bahwa semua negara Islam itu menganut Islam yang sama seperti Islam di negara-negara Timur Tengah. Dan hal ini sangatlah

tidak menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian, dalam menghadapi hal ini Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan para pemuka agama di AS dengan tujuan untuk memberi pemahaman tentang Islam yang ada di Indonesia, bagaimana Indonesia menghadapi toleransi beragama, dan bagaimana Indonesia menyelesaikan isu-isu agama. Hal ini perlu diketahui oleh AS (Hutabarat, wawancara personal, 2017).

Pertemuan para pemuka agama ini dihadiri dari berbagai agama baik Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Islam yang diadakan apabila dirasa perlu membahas suatu isu tertentu. *Socio cultural CBM* ini perlu ditingkatkan dengan mengadakan pertemuan rutin para pemuka agama sehingga CBM terbangun dengan baik, dan kecurigaan AS dapat menurun.

#### **4.3.1.7. Political CBM**

Kejadian pemilu gubernur DKI Jakarta yang terjadi pada awal tahun 2017 menimbulkan interpretasi negara-negara di dunia, termasuk AS, bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Pemilu tersebut dianggap sebagai ujian toleransi agama dan etnik bagi di Indonesia. hal demikian juga menimbulkan kekhawatiran negara di dunia bahwa kelompok Islam garis keras akan terus berusaha menggunakan agama sebagai senjata politik. Dalam hal ini pemerintah Indonesia perlu terus menunjukkan dan mengutarakan pada setiap kesempatan bahwa demokrasi di Indonesia mengarah pada arah yang sama, dan kontak antara pejabat kedua negara ada pada forum-forum dialog yang mereka bentuk.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, berikut klasifikasi indikator dalam meningkatkan CBM Indonesia-AS.

**Tabel 4.2. Klasifikasi Indikator Confidence Building Measures**

<b>No.</b>	<b>Military CBM</b>	<b>Bilateral Relations</b>
1.	<i>Communication</i>	IUSSD, USIBDD
2.	<i>Transparency</i>	Buku Putih Pertahanan, Pendidikan dan Pelatihan (CCMR, NPS, DMP, Seminar, Course), GSOMIA
3.	<i>Consultation</i>	Joint Commission Meeting
4.	<i>Goodwill</i>	Kunjungan kenegaraan
5.	<i>Economic CBM</i>	Terdapat ketidakseimbangan neraca perdagangan Indonesia-AS.
6.	<i>Socio Cultural CBM</i>	Dialog para pemuka agama
7.	<i>Political CBM</i>	Adanya kontak dengan sesama pejabat pemerintahan dimana keduanya saling membantu meningkatkan demokrasi

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa CBM kedua negara sudah baik dengan tercapainya semua indikator-indikator yang dipaparkan oleh Baviera. Akan tetapi, peningkatan dalam bilateral relations masih perlu ditingkatkan, ditunjukkan dengan isu-isu di bagian ekonomi yang mana AS sedang mengalami defisit dan surplus ada di Indonesia. Dan hambatan-hambatan mulai diberikan oleh Presiden Trump seperti kenaikan pajak untuk produk CPO Indonesia. Kemudian sudah adanya pertemuan para pemuka agama untuk membahas isu agama yang ada, tapi hal ini perlu ditingkatkan menjadi pertemuan rutin yang bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan pemerintah AS mengenai Islam Indonesia. Begitu pula dalam political CBM, pertemuan pemerintah dengan kongres AS juga perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa Indonesia sudah pada arah demokrasi yang sama dengan AS sehingga

diharapkan *human rights vetting* dapat dihapuskan dan kesetaraan dalam kerjasama dapat dicapai.

Definisi dari diplomasi pertahanan sendiri adalah semua metode dan strategi yang digunakan negara yang mungkin sedang berkompetensi dengan negara lain, tetapi mereka telah menggunakan beberapa hal seperti ekonomi, budaya, kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan diplomasi untuk menciptakan pertemanan, diharapkan dapat bekerjasama satu sama lain, dan, yang paling penting adalah untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya (Pedrason, 2010, hal. 15). Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam meningkatkan CBM kedua negara bukan hanya dilakukan melalui bidang pertahanan saja, akan tetapi faktor lain diluar pertahanan, seperti ekonomi, budaya, dan politik juga dapat mempengaruhi *mutual trust* antara kedua negara. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam kerjasama pertahanan Indonesia-AS, perlu dilakukan peningkatan dalam faktor-faktor di luar pertahanan seperti yang dijelaskan diatas. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi rasa saling percaya di bidang pertahanan – rasa percaya pada militer negara lain – karena faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam meningkatkan CBM kedua negara.

Akan tetapi, hubungan kedua negara khususnya dalam hal kerjasama pertahanan dinilai tidak akan putus karena kedua negara memiliki kepentingan yang besar (Yulistyanto, wawancara personal, 2017). Sebagai negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga, Clinton pernah mengatakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat terjadi secara alami. Hal ini juga berdasarkan pada letak geografis Indonesia yang dipandang strategik oleh AS. AS memandang Indonesia sebagai tonggak stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Melihat letak geografis Indonesia dan peran Indonesia di kawasan membuat AS memiliki kepentingan besar di Indonesia; AS ingin memiliki hegemoni di kawasan, dan juga upayanya dalam menandingi kebangkitan Cina (Prayogo, 2017). Dan sebagian besar fokus kedua negara ini adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui perdagangan dan

pembangunan yang sangat penting tidak hanya bagi bangsa dan rakyat kedua negara, tapi juga kawasan ini (U.S. Dos, 2009-2017).

#### **4.3.2. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Tatanan *Capacity Building***

Pada subbab ini akan membahas upaya diplomasi yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara. Pengembangan kemampuan pertahanan perlu dilakukan untuk menghadapi ancaman potensial yang akan dihadapi oleh suatu negara. Selain itu, pada sistem internasional yang bersifat anarki tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara sehingga serangan dari negara lain mungkin saja terjadi. Dalam kerjasama yang sedang dilakukan oleh Indonesia dan AS ini, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bersama, dan juga melalui pengadaan alutsista.

Peningkatan kapasitas dipandang sebagai elemen penting jika perkembangan dilakukan secara berkelanjutan dan berpusat kepada manusia. Peningkatan kapasitas merupakan pendekatan untuk sebuah perkembangan, dan merupakan sebuah respon dari proses perubahan (Eade, 2007, hal. 1). Berdasarkan penjelasan Idil Syafwi (Multazam, 2010, hal. 20) bahwa diplomasi pertahanan dalam tatanan peningkatan kapasitas atau kemampuan pertahanan meliputi usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer dan pembelian alutsista. Peneliti mengklasifikasi bantuan militer dalam tatanan membangun kemampuan pertahanan yaitu pelaksanaan dari pendidikan dan pelatihan militer yang dilaksanakan oleh kedua negara.

Felix Hutabarat (2017) mengatakan bahwa CBM antara Indonesia dan AS sudah mengalami peningkatan, karena Indonesia telah mengalami perkembangan dan melakukan banyak kemajuan setelah kasus Timor Timur yang menyebabkan sanksi embargo atas isu HAM yang dilakukan Indonesia pada wilayah tersebut. Hubungan yang mulai membaik kembali

juga dapat dilihat dari dibukanya kembali kerjasama pertahanan kedua negara, salah satunya kerjasama strategis dalam hal bantuan militer (Multazam, 2010).

Kerjasama strategis dalam hal bantuan militer antara Indonesia dan AS diaplikasikan dalam bentuk latihan militer gabungan. Dengan mengadakan latihan militer gabungan ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan militer suatu negara karena adanya pertukaran informasi mengenai suatu keahlian tertentu. Latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Indonesia dan AS salah satunya adalah latihan bersama Korps Marinir TNI AL dengan United States Marine Corps (USMC) yang merupakan bagian dari latihan *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) yang bertujuan bukan hanya untuk mempererat hubungan baik Angkatan Laut kedua negara tapi juga untuk meningkatkan profesionalisme militer khususnya angkatan laut. Latihan ini terakhir dilakukan pada September 2017 lalu bertempat di Indonesia.

Kedua negara melaksanakan Latihan bersama lainnya, yaitu *Garuda Shield Program* yang merupakan latihan bilateral yang dilakukan oleh US Army Pacific (USARPAC) dan TNI AD yang bertujuan untuk mempromosikan hubungan militer ke militer yang positif, dan juga meningkatkan interoperabilitas, meningkatkan kesadaran budaya, dan meningkatkan pelatihan individu dan kolektif. Pada tahun 2017, Program Garuda Shield berlangsung pada tanggal 18 September sampai dengan 5 Oktober 2017, dan dilaksanakan di berbagai tempat di Jawa Tengah dan Jawa Barat; Lapangan Angkatan Darat Pusdik Penerbad (PPAA), Area Pelatihan Cibenda, dan juga di Sukabumi. Kegiatan dari program yang berlangsung pada tahun 2017 ini meliputi pertukaran ahli mata pelajaran penerbangan awal (SMEE) dan surveilans udara tak berawak SMEE, latihan api langsung penerbangan (Permukaan dan Littoral), latihan komando, dan latihan lapangan perusahaan infanteri (FTX) dan latihan api langsung (LFX). Pelatihan tingkat taktis ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi teknis unit-unit subordinat dan mendorong interoperabilitas taktis antar mitra (US Army Pacific, 2017).

Latihan militer gabungan ini dilaksanakan oleh Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militer agar militer Indonesia mampu menjalankan fungsi pertahanan negara yaitu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri (Buku Putih, 2015).

Lebih jauh lagi, diadakannya latihan militer bersama dengan AS bertujuan untuk membangun profesionalitas militer yang sesuai dengan nilai demokrasi dan HAM. Diharapkan hal ini akan membantu reformasi TNI dan menjadikannya sejalan atau sepemahaman dengan nilai-nilai demokrasi yang dipromosikan oleh AS, sehingga hal ini dapat menyamakan persepsi bagi kedua negara. Sebagaimana yang tercantum pada Buku Putih Pertahanan bahwa tujuan dilakukannya kerjasama pertahanan yaitu selain untuk mencegah terjadinya konflik dengan negara lain, juga untuk membangun kemampuan pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerjasama industri pertahanan (Buku Putih, 2015, hal. 71)

Setelah dicabutnya embargo AS atas bantuan peralatan alutsista Indonesia, tidak ada pembatasan yang khusus yang diberikan AS untuk Indonesia, karena hingga saat ini tidak ada masalah-masalah yang menonjol di antara keduanya. Walaupun terdapat isu-isu yang terjadi, seperti AS mengkritik akan apa yang terjadi di dalam negeri Indonesia, salah satunya adalah kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) calon Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Hal tersebut masuk dalam catatan AS, akan tetapi tidak sampai menghambat pengadaan peralatan alutsista, tidak sampai menjadi prasyarat pembelian alutsista, dan tidak sampai kembali pada kasus Timor Timur sebelumnya (Hutabarat, wawancara personal, 2017).

Selanjutnya, keterbukaan dalam latihan bersama terus ditunjukkan AS dimana AS terus menawarkan diri untuk dilibatkan dalam operasi militer Indonesia (Prayogo, 2017). Akan tetapi, Indonesia tidak mau

melibatkan AS terlalu jauh karena ditakutkan hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan bagi negara lain. Indonesia harus tetap mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktifnya yang berpedoman pada prinsip negara non blok yaitu dengan tidak memihak pada blok manapun atau tidak melakukan aliansi dengan negara manapun, akan tetapi Indonesia tetap aktif dalam kerjasama Internasional demi menciptakan kawasan yang damai baik secara regional maupun global (Buku Putih, 2015, hal. 71). Hal ini juga yang terus diingatkan oleh Kementerian Luar Negeri RI bahwa Indonesia memiliki kerjasama yang bagus dengan negara-negara lain seperti dengan Rusia atau dengan Cina. Sehingga, bebas aktif tetap harus menjadi prinsip kerjasama pertahanan untuk menjaga hubungan baik dengan semua (Prayogo, 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, latihan bersama Indonesia dan AS yang belum sampai pada level strategis merupakan perwujudan dari politik bebas aktif Indonesia. Indonesia tidak bisa terlalu dekat dengan AS, seperti melakukan latihan bersama hingga level strategis dimana melibatkan tiga matra (darat, laut, udara), karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan bagi negara lain. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan negara tersebut, sehingga menjadi hal yang wajar apabila Indonesia memiliki latihan militer bersama sampai pada level strategis dengan Malaysia. Hal tersebut dilakukan kedua negara untuk menghadapi ancaman bersama (Nurhasya, wawancara personal, 2017). Yulistyanto juga berpendapat bahwa AS akan sangat terbuka untuk latihan bersama tersebut, hanya saja Indonesia masih menjaga prinsip politik bebas aktifnya, apabila latihan bersama sampai pada level strategis, dapat dikatakan Indonesia mengkhianati prinsipnya tersebut (Yulistyanto, wawancara personal, 2017).

Selanjutnya, diplomasi pertahanan Indonesia dalam peningkatan kemampuan antara Indonesia dan AS tidak ada lagi kesulitan baik dalam kesepakatan maupun kerjasama pertahanan. Duta besar AS, Robert

Blake mengatakan bahwa embargo bukan lagi merupakan masalah dalam kerjasama pertahanan kedua negara, hal tersebut ditunjukkan dengan dijualnya helikopter Apache oleh AS ke Indonesia tanpa adanya syarat diantara kesepakatan kedua negara tersebut (Nugraha, 2015).

Dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pada tahun 2013 ditandatanganinya kontrak pembelian 8 unit helikopter Apache AH64E yang akan diterima secara bertahap mulai akhir 2017 hingga awal 2018. Hingga akhir 2017 lalu, 2 unit sudah tiba di Indonesia. Pembelian Helikopter Apache ini menimbulkan antusias sendiri bagi beberapa kalangan, pertama karena pengadaan helikopter buatan AS ini mengindikasikan kepercayaan AS terhadap Indonesia setelah pencabutan sanksi embargo, kedua karena helikopter serang ini memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi. AH-64E Guardian ini merupakan varian dari heli serang Apache yang bukan hanya terbaru, tetapi juga tercanggih. Helikopter serang ini dilengkapi fitur-fitur serba melebihi varian sebelumnya, dengan kapabilitas tempur dan survivabilitas lebih tinggi. Sehingga, Pembelian helikopter serang yang disebut sebagai salah satu yang tercanggih di dunia itu diharapkan makin memperkuat TNI, khususnya TNI AD (Antonius, 2013).

Pada periode 2012-2017, pembelian alutsista dengan AS terhitung terdapat tiga program yang berjalan. Sebelumnya, Indonesia menerima hibah 24 unit pesawat F-16, yang hingga akhir tahun 2017 lalu Indonesia sudah menerima 22 unit pesawat. 2 pesawat tidak dapat tiba tepat waktu karna mengalami kerusakan mesin saat mendarat di Hawaii, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu (AL-alawi, 2017). Kerusakan pada pesawat F-16 ini bukan yang pertama terjadi, pada 16 April 2015 lalu, salah satu F-16 yang telah tiba di Indonesia juga mengalami kecelakaan. Musibah terjadi saat jet tempur kursi tunggal F-16C TS-1643 sudah melakukan *rolling* (meluncur di landasan) untuk lepas landas. Dalam kecepatan luncur yang tinggi tersebut, tiba-tiba pilot (Komandan Skadron Udara 16, Letkol Firman Dwi Cahyono) melihat ada indikasi malfungsi di kokpit. Menyadari malfungsi yang akan berakibat fatal bila penerbangan

dilanjutkan, pilot melakukan aksi dengan membatalkan lepas landas (*abort take off*). Pesawat yang hendak melakukan terbang *flypass* di Mabes TNI Cilangkap ini merupakan salah satu rangkaian prosesi upacara pemberian baret kehormatan TNI kepada Presiden Joko Widodo, sebelumnya tiga F-16 sejenis telah terbang lebih dahulu dan tidak mengalami masalah apapun (Angkasa, 2015, hal. 32).

Sebagaimana diketahui bahwa 24 unit pesawat F-16 ini merupakan pesawat bekas pakai United States Air Force (USAF) yang sebelumnya ditawarkan oleh pihak AS pada pertemuan di East Asian Summit 2011 yang kemudian disetujui oleh pemerintah Indonesia (Altileri, 2012). 24 unit pesawat hibah ini diperbaiki kembali oleh pihak AS dengan biaya perbaikan ditanggung oleh pemerintah Indonesia, dan terkait musibah yang menimpa pesawat ini menjadi pelajaran yang mahal dan berharga. KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan bahwa TNI sudah introspeksi dan semoga tidak sampai membeli F-16 bekas pakai dimana pesawat ini merupakan buatan tahun 1980 atau telah berusia 35 tahun (Angkasa, 2015, hal. 33).

Pembelian alutsista yang berikutnya adalah pembelian 95 unit Tank M113 A1-BE, keseluruhan unitnya sudah diterima dan didistribusikan ke satuan pengguna (Kementarian Pertahanan, 2017). Pembelian alutsista ini dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanan khususnya dalam memodernisasi peralatan militer agar tidak tertinggal dengan negara lain. Pengadaan peralatan militer ini juga dilakukan Indonesia dengan menyesuaikan perubahan ancaman potensial yang sedang dihadapi oleh Indonesia, seperti pembelian Helikopter serang Apache yang bertujuan ditempatkan di pulau Natuna untuk menjaga perbatasan dengan mengandalkan fitur canggih yang dimiliki heli serang tersebut. Kemudian, pembelian alutsista ini merupakan wujud dari terciptanya Minimum Essential Force (MEF) yang digalangkan pemerintah. Pengadaan alutsista ini juga bertujuan untuk memudahkan latihan bersama yang dilakukan TNI dengan negara lain dengan adanya *interoperability*.

Pembelian helikopter Apache ini menimbulkan berbagai pandangan, nominal besar yang dikeluarkan membuat beberapa berpendapat akan lebih baik apabila nominal tersebut dialokasikan untuk membuat helikopter tempur sendiri. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) telah mengeluarkan rancangan konsep helikopter serang Gandiwa, dan akan sangat menarik apabila dapat direalisasikan (Ardiansyah, 2012). Akan tetapi, pendapat tersebut mesti dipikirkan kembali beserta dengan penghitungan mengenai besar biaya yang dibutuhkan bagi pengembangan dan produksi helikopter tersebut, dan juga mengenai penghitungan kerugian yang mungkin terjadi. Namun, bila proyek produksi helikopter secara mandiri dapat dilakukan, maka akan memberikan nilai strategis yang sangat tinggi dimana Indonesia dapat lebih mandiri dalam memperkuat TNI. Atau apabila pembelian Apache ini disertai alih teknologi, maka pengadaan alutsista ini akan sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah yaitu untuk mendukung kemandirian alutsista, dan dapat berkontribusi banyak bagi peningkatan konsep yang sudah dimiliki Indonesia tersebut.

Berdasarkan data diatas dua indikator mengenai diplomasi pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yaitu usaha-usaha kerjasama strategis yang meliputi latihan militer gabungan, dan pembelian alutsista sudah dilakukan oleh Indonesia. Sehingga, diplomasi pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat sudah cukup baik. Akan tetapi, apabila melihat kepentingan Indonesia saat ini, Indonesia membutuhkan pengadaan alutsista yang juga disertai dengan alih teknologi. Hal ini seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 mengenai industri pertahanan yang merupakan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pertahanan khususnya kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dan hal ini belum tercapai di dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam mewujudkan hal ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia. Kendala tersebut datang dari diri Indonesia

sendiri yaitu kesiapan Indonesia baik dari sumber daya manusianya maupun dari sistem yang Indonesia miliki. Kemudian, kendala dari pihak AS yaitu AS terus memberi penjelasan bahwa untuk proses alih teknologi, pemerintah AS tidak dapat ikut campur karena kewenangan tersebut dipegang oleh perusahaan, sehingga proses jual beli ini murni *business to business*.